



# LAPORAN KINERJA

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TAHUN 2024**



**Independensi - Integritas - Profesionalisme**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya, Laporan Kinerja (LAKIN) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 telah selesai disusun. LAKIN adalah media pertanggungjawaban Manajemen Satuan Kerja atas kinerja capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disepakati bersama oleh Kepala BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Auditor Utama Keuangan Negara V (saat ini menjadi Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang berisi pencapaian dari pelaksanaan 13 IKU.

Pada Tahun 2024, dari 13 IKU, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah dapat mencapai target yang ditetapkan sebanyak 12 IKU, sedangkan 1 IKU belum mencapai target. Terhadap IKU yang belum mencapai target, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan pembenahan terhadap hal-hal yang dapat meningkatkan capaian target untuk perbaikan di masa mendatang. Sedangkan capaian IKU yang telah sesuai target tidak terlepas dari kerjasama yang baik seluruh unsur pegawai baik pejabat struktural, pejabat fungsional pemeriksa, pejabat fungsional lainnya maupun pegawai penunjang dan pendukung, serta bimbingan seluruh pimpinan baik Badan maupun Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) V.

Akhir kata semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan seluruh *stakeholder* BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, baik masyarakat maupun seluruh unsur pimpinan atas amanah yang diberikan dan target kinerja yang telah ditetapkan, serta menjadi pendorong bagi pencapaian target kinerja di tahun mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Januari 2025

Kepala Perwakilan,



Agustin Sugihartatik

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi.....	4
1. Sekretariat Perwakilan.....	4
2. Bidang Pemeriksaan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	6
D. Sumber Daya.....	8
1. Sumber Daya Manusia (SDM).....	8
2. Sumber Daya Keuangan .....	14
E. Isu Strategis.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. Perencanaan Strategis.....	18
B. Target Kinerja.....	21
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	21
2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024 .....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	38
A. Hasil Evaluasi AKIP .....	38
B. Capaian Kinerja.....	40
C. Analisis Efisiensi.....	69
D. Perubahan Budaya Kerja.....	70
E. Realisasi Anggaran.....	71
F. Inovasi.....	72
G. Penghargaan.....	75
BAB IV PENUTUP.....	76
LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Struktur Organisasi.....	7
Gambar 1.2	Data Pegawai Menurut Jenjang Pangkat dan Golongan .....	9
Gambar 1.3	Data Pegawai Menurut Jabatan PNS .....	9
Gambar 1.4	Data Pegawai Menurut Jabatan TTT .....	10
Gambar 1.5	Data Pegawai Menurut Jabatan PPPK .....	11
Gambar 1.6	Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan PNS .....	12
Gambar 1.7	Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan TTT.....	12
Gambar 1.8	Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan PPPK .....	13
Gambar 1.9	Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin .....	13
Gambar 1.10	Data Pegawai Menurut Usia .....	14
Gambar 2.1	Peta Strategis Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V.....	20
Gambar 3.1	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024.....	44

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Data Pegawai menurut Jenjang Pangkat dan Golongan..... 8
Tabel 1.2	Data Pegawai menurut Jabatan PNS..... 9
Tabel 1.3	Data Pegawai menurut Jabatan TTT ..... 10
Tabel 1.4	Data Pegawai menurut Jabatan PPPK ..... 10
Tabel 1.5	Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan ..... 11
Tabel 1.6	Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin..... 13
Tabel 1.7	Data Pegawai Menurut Usia..... 14
Tabel 1.8	Anggaran BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024.... 15
Tabel 1.9	Penanganan Kasus Penyelesaian Ganti Kerugian Negara..... 16
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Perwakilan Daerah Yogyakarta..... 21
Tabel 3.1	Hasil Evaluasi AKIP BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 dan Tahun 2024..... 39
Tabel 3.2	Capaian Kinerja BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024..... 44
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahun.. 45
Tabel 3.4	Perkembangan Capaian IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2020-2024..... 48
Tabel 3.5	Perkembangan Capaian IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2020-2024..... 49
Tabel 3.6	Perkembangan Capaian IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2020-2024..... 50
Tabel 3.7	Perkembangan Capaian IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2020-2024 .. 52
Tabel 3.8	Perkembangan Capaian IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020-2024..... 54
Tabel 3.9	Perkembangan Capaian IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2020- 2024..... 55
Tabel 3.10	Perkembangan Capaian IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2020-2024..... 57
Tabel 3.11	Perkembangan Capaian IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020-2024 .... 60
Tabel 3.12	Perkembangan Capaian IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2020-2024..... 62
Tabel 3.13	Perkembangan Capaian IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2020-2024..... 64

Tabel 3.14	Perkembangan Capaian IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2020-2024.....	65
Tabel 3.15	Perkembangan Capaian IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2020-2024 .....	67
Tabel 3.16	Perkembangan Capaian IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2020-2024 .....	68
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja Tahun 2024.....	71
Tabel 3.18	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2018-2023.....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun Laporan AKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lampiran II Huruf D tentang Penyampaian Laporan Kinerja yang menyatakan bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja.

Dalam menjalankan tugas yang diemban, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024 mendapatkan alokasi anggaran (setelah perubahan) sebesar Rp20.816.514.000,00. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mencapai visi dan misi BPK sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 melalui rangkaian target Sasaran Strategis dan IKU yang harus dicapai dan telah dituangkan dalam Pencapaian Kinerja 2024 yang telah disepakati.

LAKIN disusun sebagai media pertanggungjawaban pencapaian target kinerja maupun pengelolaan anggaran, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkungan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. LAKIN disusun sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 286/K/X-XII.2/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, serta Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan 2020-2024 yang dituangkan dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 5/K/I-XIII.2/8/2021 tanggal 6 Agustus 2021.

## **B. Tugas Dan Fungsi**

BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh pelaksana BPK yang salah satunya adalah Ditjen PKN V.

Ditjen PKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Penyelenggara Haji, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Jawa dan Sumatera.

BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu perwakilan di bawah Ditjen PKN V. Sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, kota/kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh Ditjen PKN dan Ditjen Pemeriksaan Investigasi. Sedangkan fungsi BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

1. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan RIR BPK;
2. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
10. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS dan IHPL pada lingkup tugas BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, baik yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
12. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Daerah Istimewa

Yogyakarta untuk disampaikan kepada Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;

15. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditjen Pemeriksaan Investigasi;
16. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. pemutakhiran data pada aplikasi sistem informasi pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. penyusunan perangkat lunak pada lingkup tugas BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;
19. pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;
20. penyusunan laporan kinerja BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

### **C. Struktur Organisasi**

BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari :

1. Sekretariat Perwakilan;
2. Bidang Pemeriksaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun penjabaran tugas dari masing-masing unsur pelaksana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- b. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. penyusunan laporan keuangan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi sistem manajemen kinerja untuk pengukuran IKU pada lingkup BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. pengorganisasian dan penyiapan bahan penyusunan perangkat lunak pada lingkup tugas BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- g. pelaksanaan administrasi manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- h. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sekretariat Perwakilan terdiri dari:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan  
Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, dan keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, dan pemutakhiran data pada aplikasi sistem manajemen kinerja untuk pengukuran IKU pada lingkup tugas BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia  
Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, serta melaksanakan administrasi manajemen perubahan dan manajemen pengetahuan di lingkungan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Subbagian Keuangan  
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggung

jawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung untuk penyusunan laporan keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

e. Subbagian Hukum.

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta melaksanakan administrasi manajemen risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Bidang Pemeriksaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Bidang Pemeriksaan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas:

a. pada lingkup Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan BUMD, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

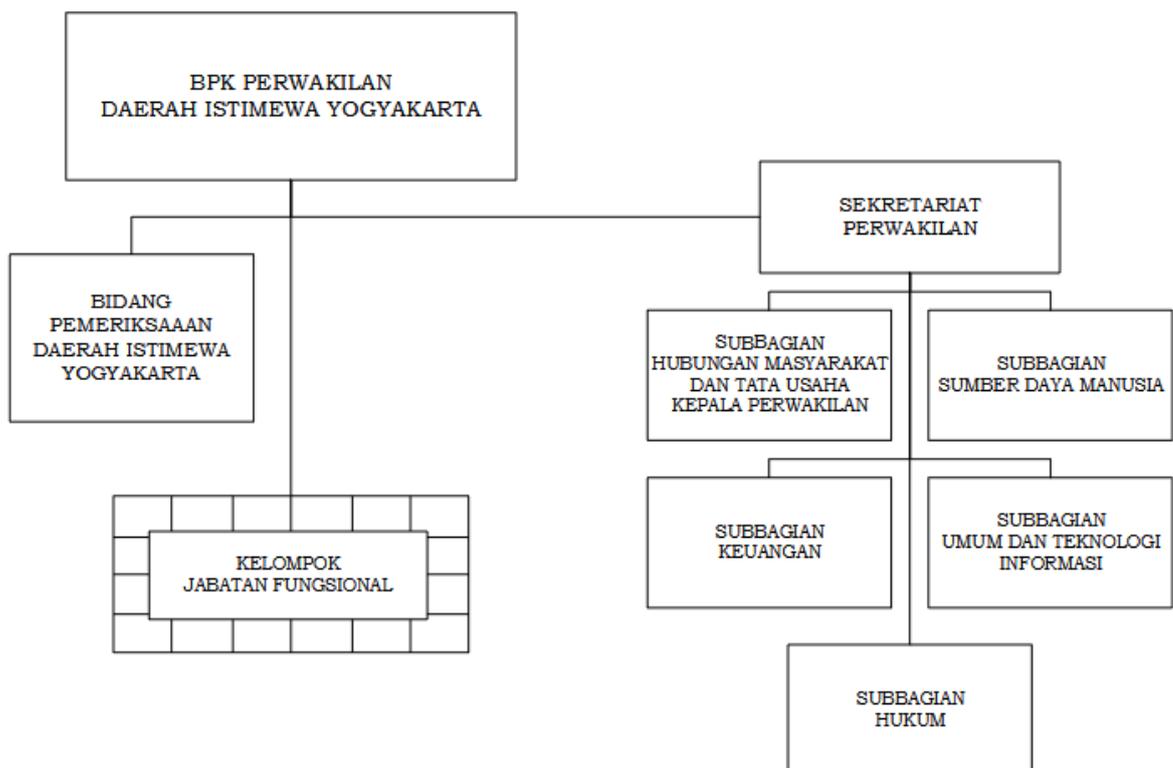
- 1) merumuskan rencana kegiatan;
- 2) mengusulkan tim pemeriksa;
- 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah;
- 5) menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS dan IHPL, baik yang pemeriksaannya

dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

- 8) melakukan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;
- 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
- 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi sistem informasi pemeriksaan; dan

b. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Struktur Organisasi BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

## D. Sumber Daya

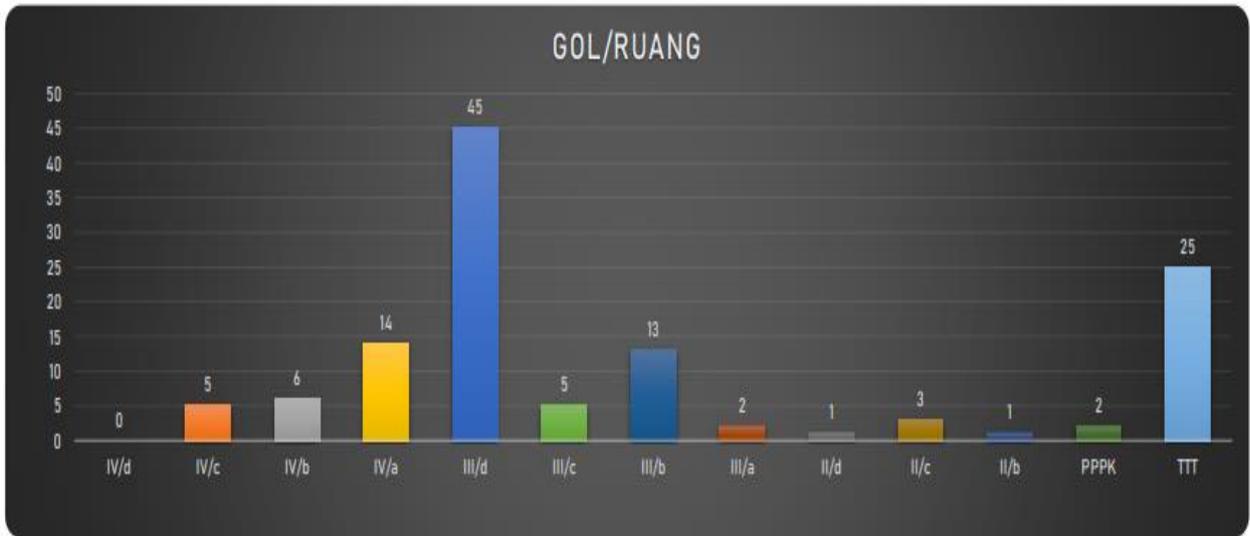
### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan posisi per 31 Desember 2024 memiliki jumlah SDM sebanyak 122 orang yang terdiri dari 95 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 25 orang Tenaga Tidak Tetap. Data bezetting pegawai di BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Data Pegawai berdasarkan jenjang Pangkat dan Golongan

Tabel 1.1 Data Pegawai Menurut Jenjang Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Madya	IV/d	0
2	Pembina Utama Muda	IV/c	5
3	Pembina Tingkat I	IV/b	6
4	Pembina	IV/a	14
5	Penata Tingkat I	III/d	45
6	Penata	III/c	5
7	Penata Muda Tingkat I	III/b	13
8	Penata Muda	III/a	2
9	Pengatur Tingkat I	II/d	1
10	Pengatur	II/c	3
11	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1
12	PPPK	-	2
13	TTT	-	25
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>122</b>

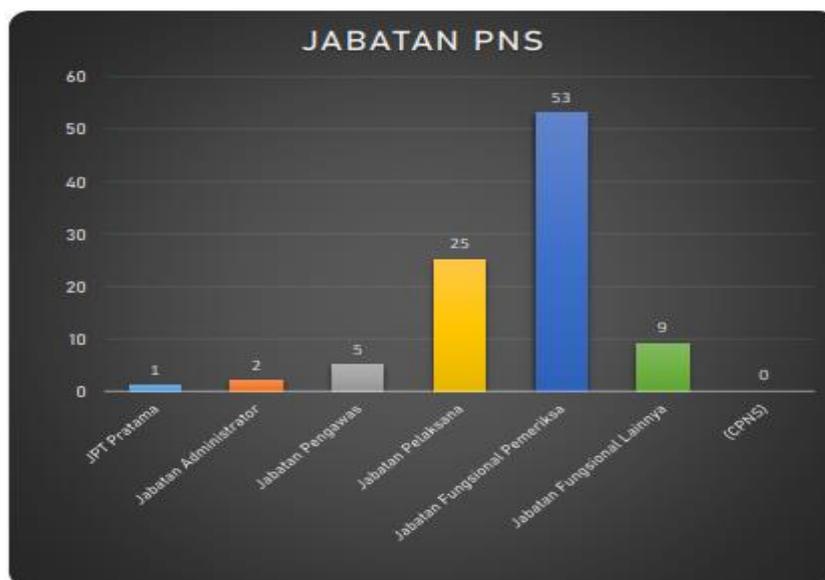


Gambar 1.2 Data Pegawai Menurut Jenjang Pangkat dan Golongan

b. Data Pegawai Menurut Jabatan

Tabel 1.2 Data Pegawai Menurut Jabatan PNS

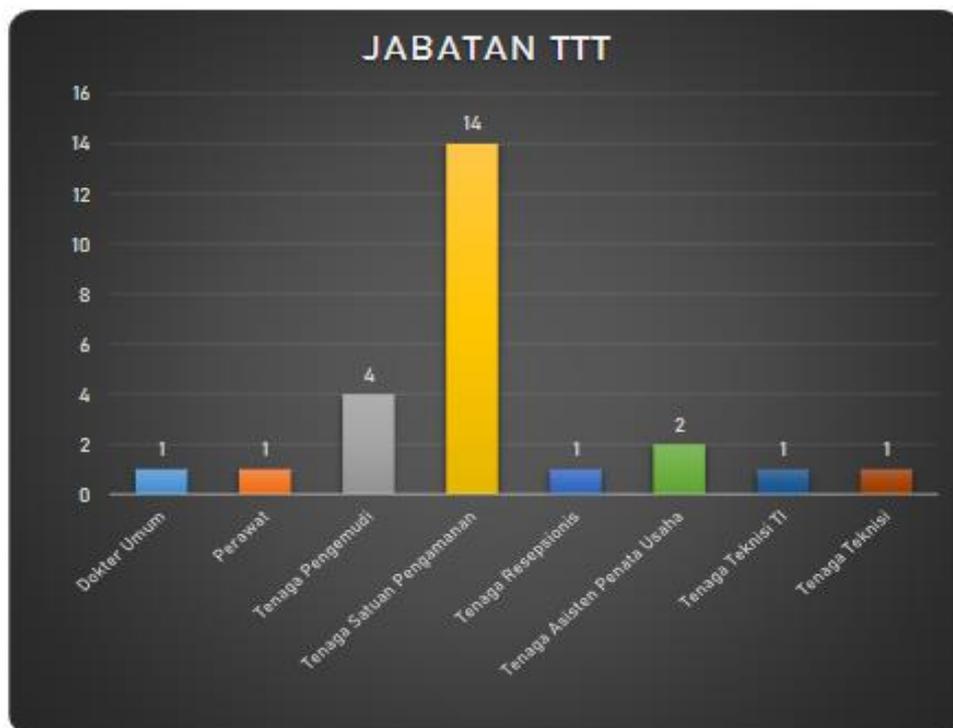
No.	Jabatan	Jumlah
1	JPT Pratama	1
2	Jabatan Administrator	2
3	Jabatan Pengawas	5
4	Jabatan Pelaksana	25
5	Jabatan Fungsional Pemeriksa	53
6	Jabatan Fungsional Lainnya	9
<b>Jumlah</b>		<b>95</b>



Gambar 1.3 Data Pegawai Menurut Jabatan PNS

Tabel 1.3 Data Pegawai Menurut Jabatan TTT

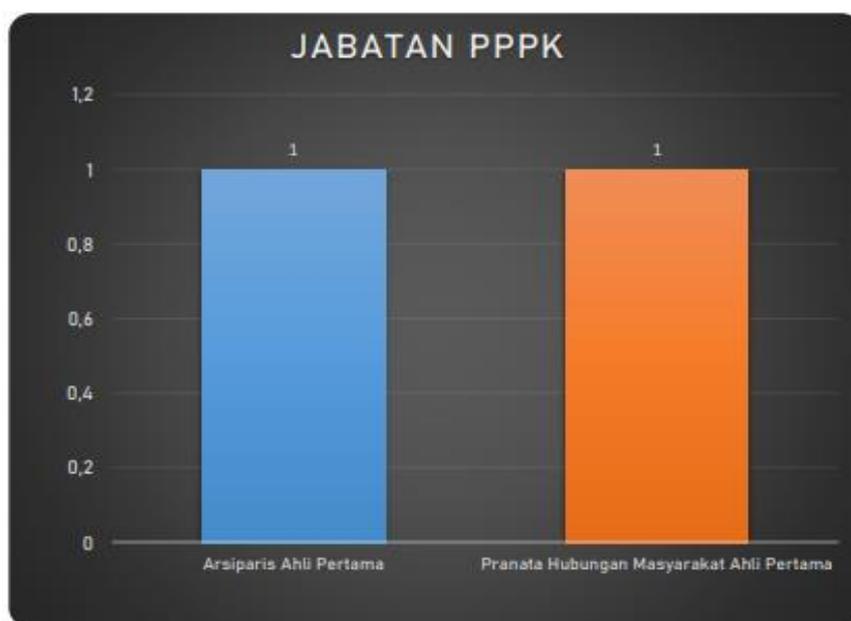
No.	Jabatan	Jumlah
1	Dokter Umum 1	1
2	Perawat 1	1
3	Tenaga Pengemudi 4	4
4	Tenaga Satuan Pengamanan 14	14
5	Tenaga Resepsionis 1	1
6	Tenaga Asisten Penata Usaha 2	2
7	Tenaga Teknisi TI 1	1
8	Tenaga Teknisi 1	1
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>



Gambar 1.4 Data Pegawai Menurut Jabatan TTT

Tabel 1.4 Data Pegawai Menurut Jabatan PPPK

No.	Jabatan	Jumlah
1	Arsiparis Ahli Pertama	1
2	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>



Gambar 1.5 Data Pegawai Menurut Jabatan PPPK

c. Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 1.5 Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	PPPK	TTT	Jumlah
1	Strata 2	46	-	-	46
2	Strata 1/D4	42	2	2	46
3	D3	3	-	2	5
3	SLTA	4	-	20	24
4	SLTP	-	-	1	1
<b>Total</b>		<b>95</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>122</b>



Gambar 1.6 Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan PNS



Gambar 1.7 Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan TTT

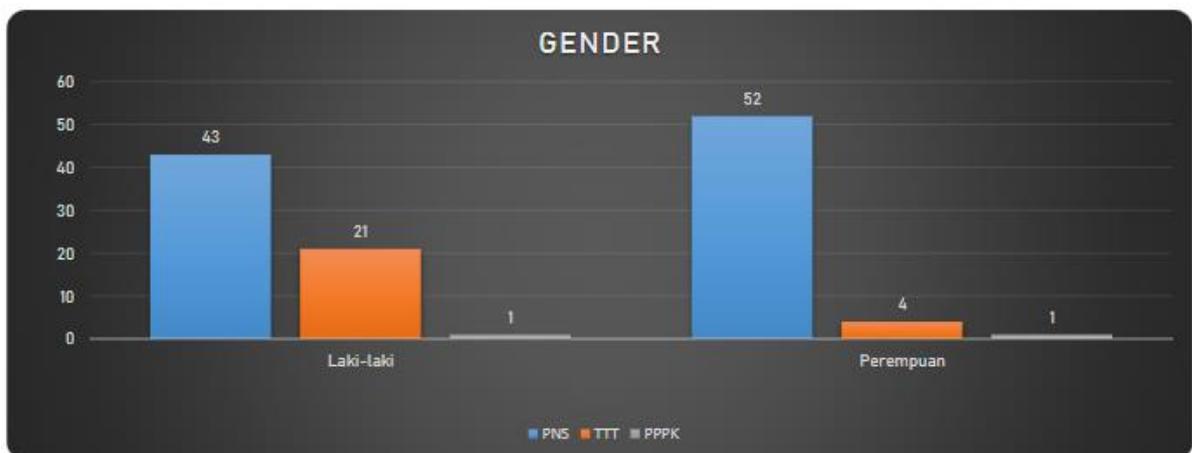


Gambar 1.8 Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan PPPK

d. Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Tabel 1.6 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	PNS	PPPK	TTT	Jumlah
1	Laki-laki	43	1	21	65
2	Perempuan	52	1	4	57
<b>Total</b>		<b>95</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>122</b>

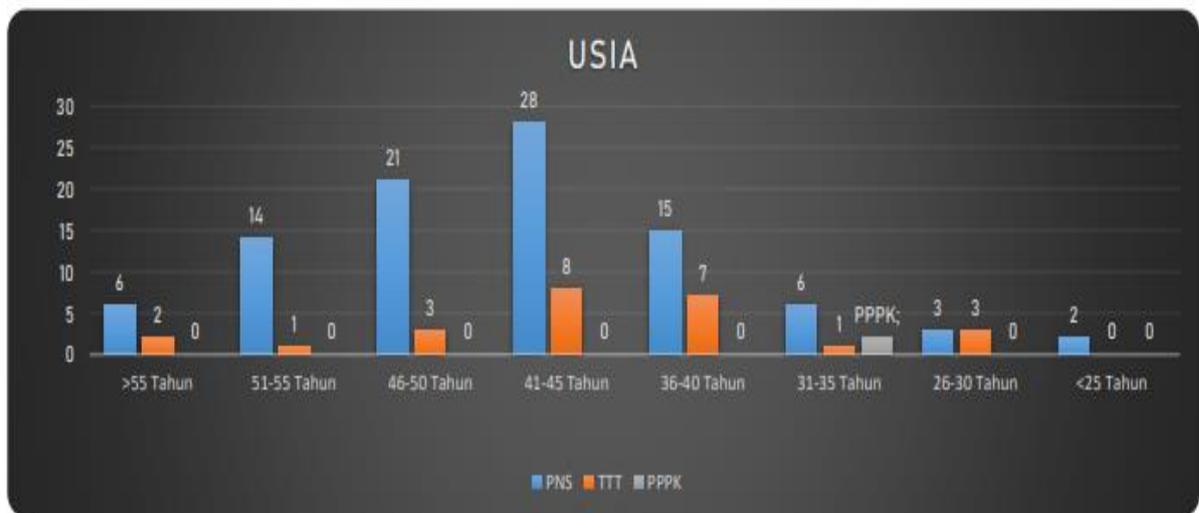


Gambar 1.9 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

e. Data Pegawai Menurut Usia

Tabel 1.7 Data Pegawai Menurut Usia

No.	Umur	PNS/CPNS	PPK	TTT	Jumlah
1	> 55 Tahun	6	0	2	8
2	51 - 55 Tahun	14	0	1	15
3	46 - 50 Tahun	21	0	3	24
4	41 - 45 Tahun	28	0	8	36
5	36 - 40 Tahun	15	0	7	22
6	31 - 35 Tahun	6	2	1	9
7	26 - 30 Tahun	3	0	3	6
8	<25 Tahun	2	0	0	2
<b>Total</b>		<b>95</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>122</b>



Gambar 1.10 Data Pegawai Menurut Usia

## 2. Sumber Daya Keuangan

Pagu anggaran BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Tahun 2024 (setelah perubahan) sebesar Rp20.816.514.000,00, secara rinci dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.8 Anggaran BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

No	Jenis Output	Rencana	
		Vol	Anggaran (Rp)
<b>Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP)</b>			
1.	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan	51	81.520.000
2.	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1	8.226.000
3.	Sumbangan IHPS Perwakilan	2	24.958.000
4.	Laporan Profil Entitas perwakilan	6	4.560.000
5.	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan	12	115.884.000
6.	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan	12	38.196.000
7.	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	12	255.142.000
8.	LHP BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta	14	5.661.509.000
<b>JUMLAH RKP</b>			<b>6.189.995.000</b>
<b>RENCANA KEGIATAN SEKJEN DAN PENUNJANG</b>			
1.	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	13	141.000.000
1.	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	13	141.000.000
2.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	12.658.369.000
	Gaji dan Tunjangan		8.105.615.000
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		4.552.754.000
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	23	183.677.000
4.	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	21	1.643.473.000
<b>JUMLAH RKSP</b>			<b>14.626.519.000</b>
<b>JUMLAH RKP DAN RKSP</b>			<b>20.816.514.000</b>

### E. Isu Strategis

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Isu-isu strategis tersebut dijelaskan pada uraian berikut.

- a. Sampai dengan Semester II Tahun 2024, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah 95,80% dari target sebesar 75%. Untuk mempertahankan dan meningkatkan persentase tindak lanjut rekomendasi BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, dilakukan upaya sebagai berikut:
- 1) Kepala Perwakilan melakukan komunikasi atas capaian tidak lanjut rekomendasi kepada kepala daerah di enam pemda di Daerah Istimewa Yogyakarta pada berbagai kesempatan, terutama pada saat kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan tiap semester dan pada saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan;
  - 2) Mendiskusikan rencana aksi dan mencantumkan dokumen tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada formulir *action plan* sehingga memudahkan entitas untuk merencanakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
- b. Sampai dengan semester II Tahun 2024 masih terdapat kasus kerugian daerah yang belum selesai, dengan rincian pada table berikut.

Tabel 1.9 Penanganan Kasus Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Penanggung Jawab	Kerugian		Pengembalian		Penghapusan		Sisa	
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml (2-(4+6))	Nilai (3-(5+7))
1	2	3	4	5	6	7		
Bendahara	9	27.722.864.728,00	4	10.778.759.281,00	0	-	5	16.944.105.447,00
Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain	292	6.733.414.908,47	247	5.413.328.443,92	1	144.270.000,00	45	1.175.816.464,55
Pihak Ketiga	55	3.801.610.585,52	54	3.239.041.222,78	4	460.913.000,00	1	101.656.362,74
Informasi Kerugian:								
Hasil Pemeriksaan BPK	691	76.211.043.549,10	639	50.691.341.681,10	1	22.662.000,00	52	25.497.039.868,00
Hasil Pemeriksaan APIP	797	20.581.241.722,91	793	3.046.786.222,91	4	76.019.420,00	4	17.458.436.080,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.844</b>	<b>135.050.175.494</b>	<b>1.737</b>	<b>73.169.256.852</b>	<b>10</b>	<b>703.864.420,00</b>	<b>107</b>	<b>61.177.054.222</b>

- c. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan manifestasi performa BPK sebagai lembaga negara yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan dan kepercayaan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK. BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan *reviu* berjenjang untuk menjaga kualitas LHP dan membentuk Tim Reviu Konsep Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan penandatanganan opini setiap tahun. Tim tersebut bertugas menjamin mutu pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Namun, berdasarkan evaluasi oleh Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam penyusunan LHP. BPK Perwakilan Daerah

Istimewa Yogyakarta berkomitmen secara maksimal untuk menghasilkan LHP yang lebih berkualitas serta meminimalisir *error* dalam LHP demi menjaga marwah dan kredibilitas BPK. Salah satu upaya BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mencapai *zero error* dalam LHP adalah dengan melaksanakan *cross reviu* antar tim pemeriksa untuk meminimalisir ketidakkonsistenan, kesalahan penulisan, dan akurasi angka antar unsur-unsur temuan.

- d. Tata kelola BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu ditingkatkan antara lain melalui penguatan jaringan TI, pemanfaatan TI, penyebarluasan pengetahuan, pengintegrasian sistem informasi dan *update database*. Peningkatan pemanfaatan TI tidak hanya untuk pelaksanaan tugas pemeriksaan, namun juga pelaksanaan tugas yang mendukung pemeriksaan. BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah memanfaatkan TI dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, antara lain dengan memanfaatkan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) LKPD dan SiAP Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Untuk mendokumentasikan aktivitas tim pemeriksa pada tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan lapangan, dan pelaporan, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunakan Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP). Untuk proses pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) telah diterapkan di seluruh entitas. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala eksternal yaitu kurang memadainya pemahaman petugas admin dan inputer SiPTL pada Pemerintah Daerah, sehingga memerlukan pembinaan secara berkesinambungan. Selain itu, dalam mendukung pelaksanaan tugas, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta memanfaatkan aplikasi TI, antara lain Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM) untuk mengelola data dan informasi SDM berupa data pribadi, pelaporan LHKPN, pelaporan SPT, pendidikan dinas serta seminar/workshop/sosialisasi/sejenis dan aplikasi persuratan Jaringan Surat Menyurat Kedinasan (JASMIN) untuk mengelola surat menyurat.
- e. Jumlah pemeriksa dan kompetensi pemeriksa penting untuk dapat menjamin pemeriksaan dapat dilaksanakan secara profesional. Untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi pemeriksa, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan *workshop*, pendidikan dan pelatihan (diklat), *Focus Group Discussion* (FGD), serta *sharing session* antarpemeriksa.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta 2020 – 2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK untuk periode Tahun 2020–2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta 2020–2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan merespon dampak pandemi COVID-19.

Hal ini merupakan langkah yang ditujukan agar hasil pemeriksaan BPK bermanfaat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang mendapat mandat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

Nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme menjadi semangat moral yang selalu dijunjung tinggi dan diimplementasikan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab BPK. Selanjutnya, sistem pengendalian mutu BPK di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi juga semakin dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan BPK. Renstra menjabarkan rancangan atas rencana lima tahunan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan.

BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pemeriksaan. Selanjutnya, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun strategi pemeriksaan dan meningkatkan sinergi dengan Institusi

Penegak Hukum (IPH) dalam merespon permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah "Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara". Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan "Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat".

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta akan mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi". Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan.

Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut.

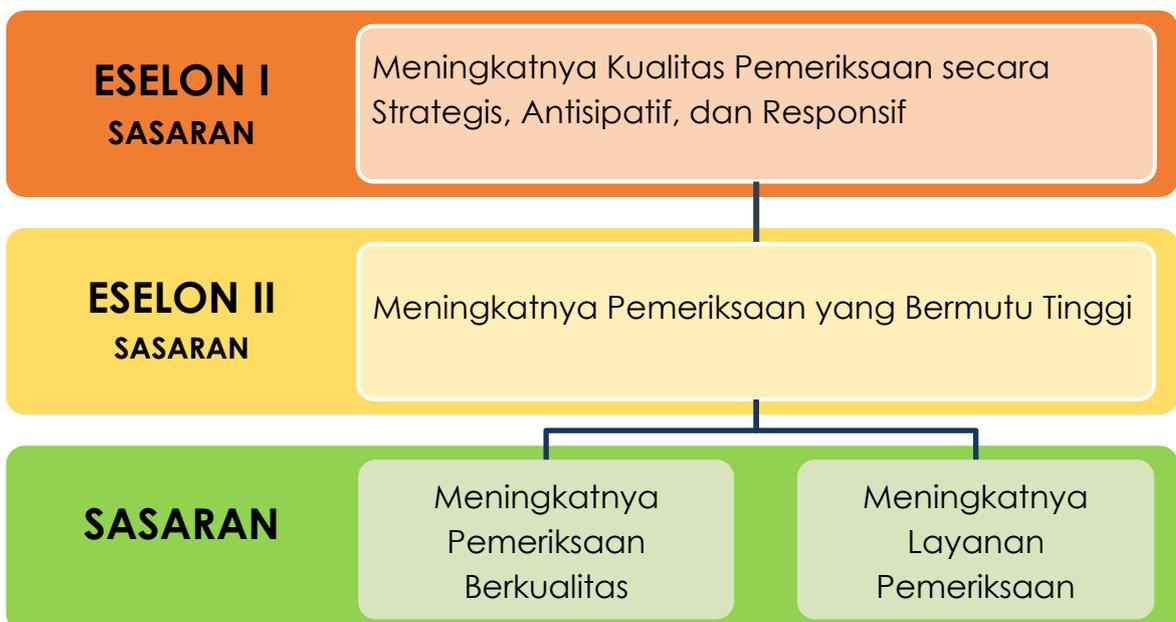
- Strategi 1 : Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis
- Strategi 2 : Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif
- Strategi 3 : Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara
- Strategi 4 : Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara
- Strategi 5 : Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh

sebab itu, arah kebijakan yang kedua difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Selanjutnya, pelaksanaan renstra ini didukung oleh sumber daya yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, diukur dengan IKU.

Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan renstra. Pelaksanaan Renstra BPK 2020–2024 dan RIR dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Capaian renstra menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra ini merupakan dokumen dinamis yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, ditetapkan Pernyataan Komitmen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disepakati bersama oleh Kepala Perwakilan sebagai Kepala Satuan Kerja dan Direktur Jenderal (Dirjen) PKN V selaku Atasan Kepala Perwakilan. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam Peta Strategi baik Tingkat Eselon I (Ditjen Pemeriksaan KN V) maupun BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun sasaran strategis oleh Ditjen Pemeriksaan KN V adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 – Peta Strategis Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V

## B. Target Kinerja

### 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun Strategi, Sasaran, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024. Berikut ini Sasaran, Sasaran Kegiatan, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024.

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama  
BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran	Indikator Kinerja		Target
<p><b>Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi Rp20.837.759.000,00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas Rp5.912.642.000,00</b></li> <li><b>Meningkatnya Layanan Pemeriksaan Rp14.925.117.000,00</b></li> </ul>	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan -4,81
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	AA -90,05
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran	Indikator Kinerja		Target
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan -3,8
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	84.50%

## 2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024

Target Pencapaian Kinerja Tahunan dan Triwulanan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dalam Rencana Aksi Pencapaian Kinerja 2024 berikut.

- a. IKU 1: Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
  - 1) Rencana Aksi Bulan Januari adalah membentuk Tim Reviu Opini; melaksanakan diklat teknis persiapan pemeriksaan LKPD; merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Control (QC)* pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan *Quality Assurance (QA)* yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP);
  - 2) Rencana Aksi Bulan Februari adalah melaksanakan pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci LKPD TA 2023 atas dua entitas dalam rangka mendukung penilaian evaluasi EPP; meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui laporan mingguan dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester I;
  - 3) Rencana Aksi Bulan Maret adalah melaksanakan pemenuhan QA dan QC dalam pemeriksaan terinci LKPD TA 2023 atas empat entitas dalam rangka mendukung penilaian evaluasi EPP; meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui laporan mingguan dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester I;
  - 4) Rencana Aksi Bulan April adalah melakukan evaluasi pemeriksaan;
  - 5) Rencana Aksi Bulan Mei adalah melakukan evaluasi pemeriksaan;
  - 6) Rencana Aksi Bulan Juni adalah melakukan evaluasi pemeriksaan;
  - 7) Rencana Aksi Bulan Juli adalah merencanakan kegiatan pemeriksaan kinerja Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP;

- 8) Rencana Aksi Bulan Agustus adalah merencanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP;
  - 9) Rencana Aksi Bulan September adalah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kinerja Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Control (QC)* Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan *Quality Assurance (QA)* yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP);
  - 10) Rencana Aksi Bulan Oktober adalah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kinerja Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Control (QC)* Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan *Quality Assurance (QA)* yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP);
  - 11) Rencana Aksi Bulan November adalah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kinerja Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Control (QC)* Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan *Quality Assurance (QA)* yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP);
  - 12) Rencana Aksi Bulan Desember adalah melaksanakan pemenuhan QA dan QC atas Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan Kepatuhan dan Pemeriksaan Interim pada Semester II Tahun 2024 dalam rangka mendukung penilaian Evaluasi EPP.
- b. IKU 2: Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
- 1) Rencana Aksi Bulan Januari adalah rapat koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2024; membentuk Tim *Reviu Opini*;
  - 2) Rencana Aksi Bulan Februari adalah melaksanakan konsinyering pemeriksaan untuk menerapkan *equal treatment* atas permasalahan yang sama;
  - 3) Rencana Aksi Bulan Maret adalah melaksanakan konsinyering pemeriksaan untuk menerapkan *equal treatment* atas permasalahan yang sama;
  - 4) Rencana Aksi Bulan Mei adalah rapat koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Semester II Tahun 2024;

- 5) Rencana Aksi Bulan Juli adalah melakukan evaluasi pemeriksaan; merencanakan kegiatan pemeriksaan kinerja pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan interim pada Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP;
- 6) Rencana Aksi Bulan Agustus adalah merencanakan kegiatan pemeriksaan kinerja, pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan interim pada Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP;
- 7) Rencana Aksi Bulan September adalah melaksanakan pemeriksaan kinerja, pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan interim pada Semester II;
- 8) Rencana Aksi Bulan Oktober adalah melaksanakan pemeriksaan kinerja, pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan interim pada Semester II;
- 9) Rencana Aksi Bulan November adalah melaksanakan pemeriksaan kinerja, pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan interim pada Semester II;
- 10) Rencana Aksi Bulan Desember adalah melaksanakan konsinyering pemeriksaan untuk menerapkan *equal treatment* atas permasalahan yang sama.

c. IKU 3: Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

- 1) Rencana Aksi Bulan Januari adalah mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasikan langsung dengan entitas terkait);
- 2) Rencana Aksi Bulan Februari adalah mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasikan langsung dengan entitas terkait).
- 3) Rencana Aksi Bulan Maret adalah mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasikan langsung dengan entitas terkait);
- 4) Rencana Aksi Bulan April adalah mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasikan langsung dengan entitas terkait);

- 5) Rencana Aksi Bulan Mei adalah mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasikan langsung dengan entitas terkait);
  - 6) Rencana Aksi Bulan Juni adalah melaksanakan pemantauan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL;
  - 7) Rencana Aksi Bulan Juli adalah mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait);
  - 8) Rencana Aksi Bulan Agustus adalah mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait);
  - 9) Rencana Aksi Bulan September adalah mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasikan langsung dengan entitas terkait);
  - 10) Rencana Aksi Bulan Oktober adalah mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasikan langsung dengan entitas terkait);
  - 11) Rencana Aksi Bulan November adalah mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasikan langsung dengan entitas terkait);
  - 12) Rencana Aksi Bulan Desember adalah melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL.
- d. IKU 4: Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
- 1) Rencana Aksi Bulan Januari adalah memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional;
  - 2) Rencana Aksi Bulan Februari adalah mengidentifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional;

- 3) Rencana Aksi Bulan Maret adalah mengidentifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional;
  - 4) Rencana Aksi Bulan April adalah mengusulkan hasil identifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional untuk selanjutnya diusulkan sebagai salah satu fokus pemeriksaan Semester II Tahun 2024;
  - 5) Rencana Aksi Bulan Juli adalah menyusun usulan tim pemeriksaan;
  - 6) Rencana Aksi Bulan Agustus adalah mengikuti workshop persiapan pemeriksaan;
  - 7) Rencana Aksi Bulan September adalah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci;
  - 8) Rencana Aksi Bulan Oktober adalah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci;
  - 9) Rencana Aksi Bulan November adalah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci;
  - 10) Rencana Aksi Bulan Desember adalah diskusi pelaporan hasil pemeriksaan dan pembahasan rencana aksi dalam melaksanakan rekomendasi.
- e. IKU 5: Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
- 1) Rencana Aksi Bulan Januari adalah melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan;
  - 2) Rencana Aksi Bulan Februari adalah melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK;
  - 3) Rencana Aksi Bulan Maret adalah melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK;
  - 4) Rencana Aksi Bulan April adalah melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK;
  - 5) Rencana Aksi Bulan Mei adalah melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan

melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK;

- 6) Rencana Aksi Bulan Juni adalah melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK;
  - 7) Rencana Aksi Bulan Juli adalah melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK;
  - 8) Rencana Aksi Bulan Agustus adalah melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK;
  - 9) Rencana Aksi Bulan September adalah melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK;
  - 10) Rencana Aksi Bulan Oktober adalah melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK;
  - 11) Rencana Aksi Bulan November adalah melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK;
  - 12) Rencana Aksi Bulan Desember adalah melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.
- f. IKU 6: Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
- 1) Rencana Aksi Bulan Januari adalah memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional;
  - 2) Rencana Aksi Bulan Februari adalah mengidentifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional;

- 3) Rencana Aksi Bulan Maret adalah mengidentifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional;
- 4) Rencana Aksi Bulan April adalah mengusulkan hasil identifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional untuk selanjutnya diusulkan sebagai salah satu fokus pemeriksaan Semester II Tahun 2024;
- 5) Rencana Aksi Bulan Juli adalah menyusun usulan tim pemeriksaan;
- 6) Rencana Aksi Bulan Agustus adalah mengikuti workshop persiapan pemeriksaan;
- 7) Rencana Aksi Bulan September adalah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci;
- 8) Rencana Aksi Bulan Oktober adalah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci;
- 9) Rencana Aksi Bulan November adalah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci;
- 10) Rencana Aksi Bulan Desember adalah diskusi pelaporan hasil pemeriksaan dan pembahasan rencana aksi dalam melaksanakan rekomendasi.

g. IKU 7: Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

- 1) Rencana Aksi Bulan Januari adalah monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan dan monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut-turut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD; pengarahan Kepala Perwakilan terkait Integritas, Independen dan Profesionalisme; mencantumkan nilai-nilai dasar dalam Surat Tugas; Pakta Integritas seluruh Tim Pemeriksa saat pemeriksaan terinci LKPD;
- 2) Rencana Aksi Bulan Februari adalah Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait nilai dasar BPK serta budaya kerja;
- 3) Rencana Aksi Bulan Juni adalah sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait nilai dasar BPK serta budaya kerja;
- 4) Rencana Aksi Bulan September adalah sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait nilai dasar BPK serta budaya kerja; mencantumkan nilai-nilai dasar dalam Surat Tugas;
- 5) Rencana Aksi Bulan Oktober adalah mempersiapkan seluruh pegawai dalam mengikuti survei Implementasi Nilai Dasar.

h. IKU 8: Hasil Evaluasi AKIP

- 1) Rencana Aksi Bulan Januari adalah penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2024; pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;
- 2) Rencana Aksi Bulan Februari adalah pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;
- 3) Rencana Aksi Bulan Maret adalah pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;
- 4) Rencana Aksi Bulan April adalah menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan I; pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku; evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasarkan hasil evaluasi;
- 5) Rencana Aksi Bulan Mei adalah pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;
- 6) Rencana Aksi Bulan Juni adalah pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;
- 7) Rencana Aksi Bulan Juli adalah pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku; evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasarkan hasil evaluasi; menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan II dengan memperhatikan capaian kinerja pada Triwulan I yang belum tercapai;
- 8) Rencana Aksi Bulan Agustus adalah pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;
- 9) Rencana Aksi Bulan September adalah pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;
- 10) Rencana Aksi Bulan Oktober adalah pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku; evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasarkan hasil evaluasi;

menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan III dengan memperhatikan capaian kinerja pada Triwulan II yang belum tercapai;

- 11) Rencana Aksi Bulan November adalah pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;
- 12) Rencana Aksi Bulan Desember adalah pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku; menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan IV dengan memperhatikan capaian kinerja pada Triwulan III.

i. IKU 9: Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

- 1) Rencana Aksi Bulan Januari adalah pimpinan mendorong melaksanakan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan *e-mail* perwakilan, memanfaatkan aplikasi JASMIN, SISDM, SMP, SiPTL dan SiAP (SiAP LK, SiAP Banparpol); memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindak lanjutnya melalui aplikasi JASMIN; menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai; menggunakan aplikasi SMP, SiAP, dan SiPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP);
- 2) Rencana Aksi Bulan Februari adalah memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindak lanjutnya melalui aplikasi JASMIN; menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai; menggunakan aplikasi SMP, SiAP, dan SiPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan TLRHP;
- 3) Rencana Aksi Bulan Maret adalah memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindak lanjutnya melalui aplikasi JASMIN; menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai; menggunakan aplikasi SMP, SiAP, dan SiPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan TLRHP;
- 4) Rencana Aksi Bulan April adalah memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindak lanjutnya melalui aplikasi JASMIN; menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, dan informasi pegawai; menggunakan aplikasi SMP, SiAP, dan SiPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan TLRHP;

- 5) Rencana Aksi Bulan Mei adalah memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindak lanjutnya melalui aplikasi JASMIN; menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, dan informasi pegawai; menggunakan aplikasi SMP, SiAP, dan SiPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan TLRHP;
- 6) Rencana Aksi Bulan Juni adalah memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindak lanjutnya melalui aplikasi JASMIN; menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, dan informasi pegawai; menggunakan aplikasi SMP, SiAP, dan SiPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan TLRHP;
- 7) Rencana Aksi Bulan Juli adalah memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindak lanjutnya melalui aplikasi JASMIN; menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, dan informasi pegawai; menggunakan aplikasi SMP, SiAP, dan SiPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan TLRHP;
- 8) Rencana Aksi Bulan Agustus adalah memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindak lanjutnya melalui aplikasi JASMIN; menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, dan informasi pegawai; menggunakan aplikasi SMP, SiAP, dan SiPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan TLRHP;
- 9) Rencana Aksi Bulan September adalah memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindak lanjutnya melalui aplikasi JASMIN; menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, dan informasi pegawai; menggunakan aplikasi SMP, SiAP, dan SiPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan TLRHP;
- 10) Rencana Aksi Bulan Oktober adalah memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindak lanjutnya melalui aplikasi JASMIN; menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, dan informasi pegawai; menggunakan aplikasi SMP, SiAP, dan SiPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan TLRHP;
- 11) Rencana Aksi Bulan November adalah memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindak lanjutnya melalui aplikasi JASMIN; menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran tempat

tinggal/domisili, pendidikan dinas, dan informasi pegawai; menggunakan aplikasi SMP, SiAP, dan SiPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan TLRHP;

12) Rencana Aksi Bulan Desember adalah memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindak lanjutnya melalui aplikasi JASMIN; menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, dan informasi pegawai; menggunakan aplikasi SMP, SiAP, dan SiPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan TLRHP.

j. IKU 10: Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

- 1) Rencana Aksi Bulan Januari adalah evaluasi Penerapan *Best Practice* Tahun 2023 (Penerapan Replikasi BP); melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Diklat LKPD persiapan pelaksanaan Pemeriksaan LKPD TA 2023);
- 2) Rencana Aksi Bulan Februari adalah inventarisir usulan *Best Practice* di Perwakilan;
- 3) Rencana Aksi Bulan Maret adalah melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (pelaksanaan mentoring bagi pegawai magang);
- 4) Rencana Aksi Bulan April adalah melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan wawancara berbasis pengetahuan);
- 5) Rencana Aksi Bulan Mei adalah inventarisir replikasi BP untuk diterapkan;
- 6) Rencana Aksi Bulan Juni adalah penyusunan usulan *Best Practice* atau replikasi *Best Practice*;
- 7) Rencana Aksi Bulan Juli adalah Penyusunan usulan *Best Practise* atau replikasi *Best Practise*; melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (*Peer Assist*);
- 8) Rencana Aksi Bulan Agustus adalah penyusunan usulan *Best Practise* atau replikasi *Best Practise*;
- 9) Rencana Aksi Bulan September adalah penyusunan usulan *Best Practise* atau replikasi *Best Practise*;
- 10) Rencana Aksi Bulan Oktober adalah melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (pelaksanaan mentoring atas pelaksanaan PKL Anak Sekolah/Magang); penyusunan usulan *Best Practise* atau replikasi *Best Practise*;
- 11) Rencana Aksi Bulan November adalah penyusunan usulan *Best Practise* atau replikasi *Best Practise*;
- 12) Rencana Aksi Bulan Desember adalah mengusulkan *Best Practice* atau replikasi *Best Practice*.

k. IKU 11: Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

- 1) Rencana Aksi Bulan Januari adalah meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan Perwakilan salah satunya melalui pemeriksaan LKPD; pencantuman pasal Kode Etik di Surat Tugas; membuat pernyataan independensi dan pakta integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan; menyediakan *Whistle Blower System* Perwakilan berupa kotak pengaduan dan pengaduan *online*;
- 2) Rencana Aksi Bulan Februari adalah meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan Perwakilan salah satunya melalui pemeriksaan LKPD; menyediakan *Whistle Blower System* Perwakilan berupa kotak pengaduan dan pengaduan *online*;
- 3) Rencana Aksi Bulan Maret adalah meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan pemeriksaan LKPD; menyediakan *Whistle Blower System* Perwakilan berupa kotak pengaduan dan pengaduan *online*; menyebarkan kuisisioner IIP setelah selesai pekerjaan lapangan;
- 4) Rencana Aksi Bulan April adalah meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan pemeriksaan LKPD; menyediakan *Whistle Blower System* Perwakilan berupa kotak pengaduan dan pengaduan *online*; menyebarkan kuisisioner IIP setelah selesai pekerjaan lapangan;
- 5) Rencana Aksi Bulan Mei adalah menyediakan *Whistle Blower System* Perwakilan berupa kotak pengaduan dan pengaduan *online*;
- 6) Rencana Aksi Bulan Juni adalah menyediakan *Whistle Blower System* Perwakilan berupa kotak pengaduan dan pengaduan *online*;
- 7) Rencana Aksi Bulan Juli adalah menyediakan *Whistle Blower System* Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan Online;
- 8) Rencana Aksi Bulan Agustus adalah menyediakan *Whistle Blower System* Perwakilan berupa kotak pengaduan dan pengaduan *online*;

- 9) Rencana Aksi Bulan September adalah meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan Perwakilan salah satunya melalui Pemeriksaan DTT dan Kinerja; pencantuman pasal kode etik di Surat Tugas; membuat pernyataan independensi dan pakta integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan; menyediakan *Whistle Blower System* Perwakilan berupa kotak pengaduan dan pengaduan *online*;
- 10) Rencana Aksi Bulan Oktober adalah meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan Perwakilan salah satunya melalui Pemeriksaan DTT dan Kinerja; menyediakan *Whistle Blower System* Perwakilan berupa kotak pengaduan dan pengaduan *online*;
- 11) Rencana Aksi Bulan November adalah meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan Perwakilan salah satunya melalui Pemeriksaan DTT dan Kinerja; menyediakan *Whistle Blower System* Perwakilan berupa kotak pengaduan dan pengaduan *online*;
- 12) Rencana Aksi Bulan Desember adalah meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan Perwakilan salah satunya melalui Pemeriksaan DTT dan Kinerja; menyediakan *Whistle Blower System* Perwakilan berupa kotak pengaduan dan pengaduan *online*; evaluasi hasil kuisisioner IIP dan menindaklanjuti jika hasilnya tidak memuaskan.

I. IKU 12: Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

- 1) Rencana Aksi Bulan Januari adalah usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai; menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai;
- 2) Rencana Aksi Bulan Februari adalah menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;
- 3) Rencana Aksi Bulan Maret adalah menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai

- sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;
- 4) Rencana Aksi Bulan April adalah menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;
  - 5) Rencana Aksi Bulan Mei adalah menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;
  - 6) Rencana Aksi Bulan Juni adalah menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;
  - 7) Rencana Aksi Bulan Juli adalah menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;
  - 8) Rencana Aksi Bulan Agustus adalah menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;
  - 9) Rencana Aksi Bulan September adalah menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;
  - 10) Rencana Aksi Bulan Oktober adalah menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;
  - 11) Rencana Aksi Bulan November adalah menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;
  - 12) Rencana Aksi Bulan Desember adalah menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.

m. IKU 13: Tingkat Kinerja Anggaran

- 1) Rencana Aksi Bulan Januari adalah melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA 2023; menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran;
- 2) Rencana Aksi Bulan Februari adalah menyusun data capaian output; melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran;
- 3) Rencana Aksi Bulan Maret adalah menyusun data capaian output; melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang mana proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran; menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan;
- 4) Rencana Aksi Bulan April adalah memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, untuk menghindari pencairan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun; memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan 200 juta diselesaikan maksimal Triwulan II;
- 5) Rencana Aksi Bulan Mei adalah mempercepat proses lelang untuk belanja modal yang terkena blokir;
- 6) Rencana Aksi Bulan Juni adalah menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan;
- 7) Rencana Aksi Bulan Juli adalah menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan; mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proposional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan dan rencana penarikan dana;
- 8) Rencana Aksi Bulan Agustus adalah melakukan koordinasi internal untuk memantau penyerapan anggaran Triwulan I dan Triwulan II, serta segera melaksanakan kegiatan yang belum terlaksana pada Triwulan I dan Triwulan II atau melakukan revisi apabila kegiatan tersebut tidak bisa terlaksana;
- 9) Rencana Aksi Bulan September adalah menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan;
- 10) Rencana Aksi Bulan Oktober adalah segera melakukan revisi belanja pegawai apabila terdapat indikasi kekurangan;

- 11) Rencana Aksi Bulan November adalah melakukan reviu dan optimalisasi kegiatan yang belum terlaksana;
- 12) Rencana Aksi Bulan Desember adalah melakukan reviu dan optimalisasi kegiatan yang belum terlaksana.

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Hasil Evaluasi AKIP**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan BPK Nomor 2/K/I-XIII.2/5/2021 tentang Piagam Pengawasan Internal BPK, Inspektorat Jenderal melakukan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Evaluasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen Akuntabilitas Kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Tujuan Evaluasi secara umum adalah untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, dan secara khusus bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan melakukan upaya perbaikan yaitu melakukan koordinasi dengan Biro SDM untuk penyusunan *cascading* kinerja dari satuan kerja hingga ke level individu sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Tahun 2024, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan nilai sebesar **91,40** dengan predikat "**AA**" yang menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Sangat Memuaskan**", yaitu pada BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah terwujud *good governance*, dan telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan efisien (*reform*). Nilai AKIP Tahun 2024 tersebut apabila dibandingkan dengan Nilai AKIP Tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 0,90. Rincian hasil revidu adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Hasil Evaluasi AKIP BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai (Tahun)	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	27,60	27,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	26,10	27,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,80	13,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	23,00	23,00
<b>Total</b>		<b>100,00</b>	<b>90,50</b>	<b>91,40</b>
<b>Predikat</b>			<b>AA</b>	<b>AA</b>

Lebih lanjut, uraian hasil reuiu AKIP Tahun 2024 pada BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi kriteria pada komponen Perencanaan Kinerja secara optimal dengan upaya berikut:

- 1) secara rutin melakukan evaluasi atas indikator dan target kinerja;
- 2) menyusun perencanaan kinerja yang berorientasi hasil, dengan indikator SMART, serta *cascading* sampai dengan level individu; dan
- 3) menggunakan aplikasi proses RKA dalam menyusun anggaran dan proses penelitian anggaran.

b. Pengukuran Kinerja

BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi kriteria pada komponen Pengukuran Kinerja secara optimal dengan upaya pemanfaatan portal kolaborasi untuk penyampaian data/dokumen dan penggunaan aplikasi PRISMA untuk pengukuran kinerja yang dimonitor secara triwulanan.

Selain itu, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah melakukan upaya inovatis, dengan mereplikasi *Best Practice* (*Best Practice-Replikasi*) dengan judul “*SIPINSET (Sistem Peminjaman Aset) BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta*” yang diakui oleh Direktorat PSMK sebagai capaian Indikator Kinerja (IK) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan melalui Nota Dinas Nomor 43/ND/XII.1/01/2024 tanggal 17 Januari 2024.

c. Pelaporan Kinerja

BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi kriteria pada komponen Pelaporan Kinerja secara optimal yaitu LAKIN BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 telah menyajikan seluruh informasi yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaan. Selain itu, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah memanfaatkan revidi LAKIN untuk menyempurnakan perencanaan kinerja tahun berikutnya.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Interna

BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi kriteria pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara optimal yaitu telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Selain itu, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan sumber daya yang memadai.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka mempertahankan/lebih meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta selalu memperhatikan pemenuhan kriteria pada perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan BPK RI.

## **B. Capaian Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama Tahun 2024, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja dengan uraian berikut.

1. Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP)

a) LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada Tahun Anggaran 2024, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik sebanyak 51 LHP dengan anggaran setelah revisi sebesar Rp81.520.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik yang

menghasilkan 51 LHP dengan realisasi sebesar Rp80.822.140,00 atau sebesar 99,14%.

b) Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan

Pada Tahun Anggaran 2024, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan 1 Laporan Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan dengan anggaran sebesar Rp8.226.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan yang menghasilkan 1 Laporan Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan dengan realisasi sebesar Rp2.000.000,00 atau sebesar 24,31%.

c) Sumbangan IHPS Perwakilan

Pada Tahun Anggaran 2024, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan 2 Laporan Sumbangan IHPS dengan anggaran sebesar Rp24.958.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menghasilkan 2 Laporan sumbangan IHPS dengan realisasi sebesar Rp24.952.338,00 atau sebesar 99,98%.

d) Laporan Profil Entitas Perwakilan

Pada Tahun Anggaran 2024, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan 6 Laporan Profil Entitas dengan anggaran sebesar Rp4.560.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan yang menghasilkan 6 Laporan Profil Entitas Perwakilan dengan realisasi sebesar Rp4.560.000,00 atau sebesar 100,00%.

e) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada Tahun Anggaran 2024, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan 12 Laporan Pemantauan TLHP dengan anggaran setelah revisi sebesar Rp115.884.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan menghasilkan 12 Laporan dengan realisasi sebesar Rp101.475.000,00 atau sebesar 87,57%.

- f) Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada Tahun Anggaran 2024, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan 12 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dengan anggaran setelah revisi sebesar Rp38.196.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Semester I dan Semester II Tahun 2024 dan menghasilkan 12 Laporan dengan realisasi sebesar Rp17.700.000,00 atau sebesar 46,34%.

- g) Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan

Pada Tahun Anggaran 2024, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan 12 Laporan Layanan Manajemen Pemeriksaan dengan anggaran setelah revisi sebesar Rp255.142.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan layanan manajemen pemeriksaan yang menghasilkan 12 laporan dengan realisasi sebesar Rp250.400.865,00 atau sebesar 98,14%.

- h) LHP BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada Tahun Anggaran 2024, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan output Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 14 LHP dengan anggaran setelah revisi sebesar Rp5.661.509.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan Pemeriksaan yang menghasilkan 14 LHP dengan realisasi sebesar Rp5.430.012.428,00 atau sebesar 95,91%.

2. Rencana Kegiatan Sekjen dan Penunjang (RKSP)

- a) Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta merencanakan pengadaan 13 unit Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan anggaran sebesar Rp141.000.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan pengadaan 13 unit Sarana Bidang TIK dengan realisasi sebesar Rp139.500.000,00 atau sebesar 98,94%.

b) Layanan Dukungan Manajemen Internal

1) Gaji dan Tunjangan

BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menganggarkan pembayaran gaji dan tunjangan setelah revisi sebesar Rp8.105.615.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah merealisasikan gaji dan tunjangan sebesar Rp8.020.405.896,00 atau sebesar 98,95%.

2) Operasional dan Pemeliharaan Kantor

BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menganggarkan layanan perkantoran setelah revisi sebesar Rp4.552.754.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah merealisasikan Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp4.542.885.189,00 atau sebesar 99,78%.

c) Layanan Sarana dan Prasarana Internal

BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta merencanakan pengadaan 23 unit Sarana dan Prasarana Internal dengan anggaran Rp183.677.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan pengadaan Sarana dan Prasarana Internal sebanyak 23 unit dengan realisasi sebesar Rp183.317.999,00 atau sebesar 99,80%.

d) Layanan Manajemen Internal Perwakilan

BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta merencanakan kegiatan Layanan Manajemen Internal Perwakilan dengan anggaran Rp1.643.473.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan Layanan Manajemen Internal Perwakilan dan menghasilkan 21 Laporan dengan realisasi sebesar Rp1.619.664.719,00 atau sebesar 98,55%.

Pada Tahun 2024, skor kinerja BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 100,43. Skor tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar 100,63. Skor capaian kinerja menunjukkan tren yang dapat disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024

Pada Tahun 2024 ini skor BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan skor sebesar 0,2. Penurunan realisasi ini disebabkan terdapat satu indikator yang tidak mencapai target secara optimal, yaitu IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan. Penurunan realisasi ini disebabkan adanya salah satu komponen penilaian yaitu hasil evaluasi EPP atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan terdapat catatan evaluasi. Selain itu terdapat enam indikator yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP, IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi, IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran.

Capaian kinerja BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta diukur berdasarkan pencapaian atas 13 IKU yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024 (periode pengukuran kinerja)		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	84%	84
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	95,80%	105

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024 (periode pengukuran kinerja)		
		Target	Realisasi	Capaian
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,50%	100,5
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100%	100
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat memuaskan (4,81)	Sangat memuaskan (4,81)	100
8	Hasil Evaluasi AKIP	AA (90,05)	AA (91,40)	101,5
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	99,99%	102,04
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	106,90%	105
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Sangat memuaskan (3,80)	Sangat memuaskan (4,41)	105
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100%	100
13	Tingkat Kinerja Anggaran	84,50%	91,94%	105
<b>Skor Kinerja</b>		<b>100,43</b>		

Perbandingan realisasi Tahun 2024 dengan realisasi tahun sebelumnya selama periode Renstra BPK dan target lima tahun sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima tahun

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi					Capaian TW IV Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
				2020	2021	2022	2023	TW IV 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=9:4)
1	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	91,67%	94,29%	94,29%	92,00%	84,00%	84,00%
2		Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
3		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	84,29%	88,16%	94,83%	95,46%	95,80%	127,73%
4		Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	100,45%	100,55%	100,23%	100,51%	100,50%	100,50%

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi					Capaian TW IV Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
				2020	2021	2022	2023	TW IV 2024	
5		Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100,00%	100,00%	100,00%	100,02%	100%	100,00%	100,00%
6		Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	104,00%	100,33%	100,51%	100,51%	100,00%	100,00%
7		Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,81	5,00	4,45	4,82	4,87	4,81	100,00%
8		Hasil Evaluasi AKIP	90,05	85,82	87,81	89,05	90,5	91,4	101,50%
9		Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98,00%	99,53%	99,53%	94,70%	98,87%	99,99%	102,03%
10		Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,00%	125,00%	100,00%	103,72%	101,43%	106,90%	106,90%
11		Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,83	4,12	3,72	4,01	4,41	116,05%
12		Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	98,59%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13		Tingkat Kinerja Anggaran	84,50%	92,05%	91,06%	89,34%	91,04%	91,94%	108,80%

Capaian masing-masing IKU tersebut secara rinci dapat diuraikan pada paragraf berikut.

### 1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP. QC Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).

Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. LHP sebagai produk utama dari BPK tidak boleh mengandung kesalahan (*zero defect*) agar terhindar dari risiko hukum atas semua tuntutan atau gugatan terhadap LHP BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah dimanfaatkan untuk perbaikan tata kelola keuangan negara. Pada Tahun 2024, Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan proses QC dan QA atas 14 LHP yaitu:

1. LHP LKPD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023;
2. LHP LKPD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023;
3. LHP LKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023;
4. LHP LKPD Pemda D.I.Y Tahun Anggaran 2023;
5. LHP LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;
6. LHP LKPD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
7. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Persampahan TA 2021 s.d Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Sleman dan Instansi Terkait Lainnya;
8. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Persampahan TA 2021 s.d Semester I 2024 pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Instansi Terkait Lainnya;
9. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya;
10. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Instansi Terkait Lainnya;
11. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 Periode Tahun 2023 s.d Semester I Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta dan Instansi Terkait Lainnya;
12. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024 (s.d 30 September) pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Instansi Terkait Lainnya;
13. Pemeriksaann Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (s.d triwulan III) pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Capaian indikator ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Perkembangan Capaian IKU 1  
Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan  
Tahun 2020-2024

IKU 1	Tahun				
Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	91.67%	94.29%	94.29%	92.00%	84.00%
Capaian	91.67	94.29	94.29	92.00	84.00
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	91.67%	94.29%	94.29%	92,00%	84.00%

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2024 adalah sebesar 84.00% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 84.00%. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)* maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP belum sepenuhnya maksimal.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 92,00%, dan belum mencapai target yang ditetapkan. Penurunan IKU Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan tersebut disebabkan salah satu komponen penilaian yaitu hasil evaluasi EPP atas konsistensi dari LHP yang diterbitkan terdapat catatan evaluasi.

Untuk meningkatkan capaian atas IKU 1 ini, Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta akan berupaya meningkatkan kualitas pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, mulai dari komitmen tim pemeriksa untuk menyajikan konsep hasil pemeriksaan (KHP) *zero defect* melalui reviu berjenjang, reviu silang dan reviu oleh Tim Reviu yang dibentuk oleh Kepala Perwakilan. Tim Reviu menetapkan standar reviu mengacu pada reviu yang dilaksanakan oleh EPP dan Itama. Tim Reviu tersebut terdiri dari perwakilan seluruh tim pemeriksa dan pelaksana pada unit kerja selain pemeriksaan untuk meningkatkan kecermatan.

## 2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian simpulan dalam LHP Kinerja dan DTT yang diterbitkan oleh satuan kerja pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2) Kinerja dan DTT. Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas LHP. Capaian kinerja IKU ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Perkembangan Capaian IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2020-2024

IKU 2	Tahun				
Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Capaian	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2024 adalah 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100. Hal ini menunjukkan bahwa hasil evaluasi atas simpulan dalam LHP yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 100% dan konsisten selama empat tahun terakhir. Ketercapaian tersebut menunjukkan dukungan dan komitmen seluruh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) dan Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) dalam memenuhi tujuan dan simpulan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Program Pemeriksaan serta harapan Penugasan. Peran dari unsur-unsur tersebut dibutuhkan untuk menjaga agar LHP BPK mampu menjawab tantangan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara efektif, ekonomi dan efisien.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU 2 BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta akan berupaya senantiasa menjaga keputusan manajemen untuk mewujudkan kesesuaian hasil pemeriksaan dengan

harapan penugasan dan mengomunikasikan harapan penugasan dari pimpinan kepada tim pemeriksa melalui pengarahan kepala perwakilan sebelum tim pemeriksa memulai tugas pemeriksaan. Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebesar Rp1.426.002.000,00 untuk empat LHP Kinerja dan sebesar Rp1.534.802.000,00 untuk empat LHP Dengan Tujuan Tertentu.

Realisasi IKU 2 pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang telah mencapai target ini diharapkan dapat menjadi *baseline* atas peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra periode berikutnya.

### 3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Tindak Lanjut Rekomendasi yang diukur adalah rekomendasi yang telah disampaikan kepada *auditee* sejak Tahun 2005. Data yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah data olahan dari IHPS terbaru pada tahun berjalan yang diterbitkan oleh EPP.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Capaian indikator ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Perkembangan Capaian IKU 3  
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2020-2024

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	84.29%	88.16%	94.83%	95.46%	95,80%
Capaian	105	105	105	105	105
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	112.38%	117.54%	126.44%	127.28%	127,73%

Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2024 adalah sebesar 95,80% dari target sebesar 75% sehingga capaiannya sebesar 105. Capaian skor realisasi IKU 3 cenderung naik dari tahun ke tahun, dan dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini

menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan semakin meningkat yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut didukung oleh komitmen dan peran aktif BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan antara lain:

1. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SiPTL;
2. Melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen tindak lanjut melalui SiPTL;
3. Verifikasi dan validasi tindak lanjut atas penyelesaian tindak lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya ke dalam status Telah Selesai (TS);
4. Mendorong Pemerintah Daerah melakukan input data Tindak Lanjut melalui SiPTL;
5. Mendiskusikan rencana aksi dengan entitas dan mencantumkan dokumen tindak lanjut dalam formulir rencana aksi; serta
6. Melaksanakan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dengan entitas setiap semester.

Berbagai langkah yang ditempuh berhasil menaikkan pencapaian IKU 3 sehingga di masa yang akan datang, langkah-langkah tersebut dapat terus dilakukan. BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta akan selalu mengupayakan langkah-langkah yang strategis dan simultan dalam pelaksanaan pemantauan TLRHP seperti:

1. Kegiatan percepatan pemantauan tindak lanjut yang dinilai mampu mempercepat upaya penyelesaian tindak lanjut oleh entitas;
2. Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti;
3. Mengomunikasikan rekomendasi yang bersifat administrasi kepada audite agar dapat segera ditindaklanjuti;
4. Mendiskusikan rencana aksi dengan entitas dan mencantumkan dokumen tindak lanjut dalam formulir rencana aksi.

Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebesar Rp101.475.000,00 untuk 12 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Realisasi IKU 3 pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang telah melebihi target ini diharapkan dapat menjadi *baseline* atas peningkatan kinerja organisasi pada Renstra periode berikutnya.

#### 4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/signifikan lainnya berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu Unit Kerja sebagai koordinator.

Pemeriksaan signifikan lainnya adalah pemeriksaan yang dilaksanakan untuk merespon adanya perubahan situasi dan kondisi yang berkembang selama periode renstra, serta isu-isu strategis lain yang berkembang di masyarakat. Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan secara tematik baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Alokasi penambahan skor adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN dan SDG's. Capaian indikator ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Perkembangan Capaian IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2020-2024

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100,46%	100,55%	100,23%	100,51%	100,50%
Capaian	105	105	100,23	100,51	100,50
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	100,46%	100,55%	100,23%	100,51%	100,50%

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2024 adalah sebesar 100,50% dari target

sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100,50. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Realisasi IKU 4 ini pada Tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 100,51%, dan masih melebihi target yang ditetapkan. IKU 4 dapat tercapai karena BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya mendukung kebijakan pemeriksaan yang ditentukan oleh Pimpinan BPK dan aktif melakukan koordinasi dengan Direktorat Pemeriksaan Keuangan Negara terkait.

Untuk mempertahankan capaian IKU 4 BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya untuk terus mendukung pemeriksaan tematik nasional dalam bentuk perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pemeriksaan. Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian IKU 4 ini adalah sebesar Rp1.164.688.955,00 dari anggaran (setelah perubahan) sebesar Rp1.238.592.000,00 untuk tiga pemeriksaan berikut.

- a. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum Tahun 2024 Periode Tahun 2023 s.d. Semester I Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya;
- c. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Instansi Terkait Lainnya.

Realisasi IKU 4 pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang telah mencapai target ini diharapkan dapat menjadi *baseline* atas peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra periode berikutnya.

## **5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan**

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH atau pemangku kepentingan lainnya. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan.

Pemenuhan pemeriksaan dari pemangku kepentingan ini dikoordinir oleh AUI dan Pusat Kemitraan Global. Satuan kerja pemeriksaan lainnya dapat berkontribusi dalam pemeriksaan tersebut melalui kontribusi tenaga pemeriksa.

Alokasi penambahan skor adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK. Sumber data diperoleh dari Surat Tugas Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan. Capaian indikator ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Perkembangan Capaian IKU 5  
Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020-2024

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	100.00%	100.00%	100.02%	100.00%	100.00%
Capaian	100.00	100.00	100.02	100.00	100.00
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	100.00%	100.00%	100.02%	100.00%	100.00%

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan Instansi Penegak Hukum (IPH) atau pemangku kepentingan lainnya.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 100% dan tercapai selama empat tahun terakhir. Realisasi IKU 5 tercapai dengan merespon dan mengikuti prosedur pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan, melakukan evaluasi atas permintaan tersebut, dan menindaklanjuti dengan pemeriksaan. Selanjutnya untuk menyesuaikan dengan anggaran, diajukan revisi RKP untuk memastikan ketersediaan anggaran pemeriksaannya.

Untuk mempertahankan IKU 5, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya memberikan kontribusi atas pemenuhan pemeriksaan

dari pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemeriksaan investigatif didukung dengan peningkatan sinergi antara BPK dengan IPH dalam merespon seluruh permintaan pemeriksaan.

Realisasi IKU 5 pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang telah mencapai target ini diharapkan dapat menjadi *baseline* atas peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra periode berikutnya.

## 6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal dilakkan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra, dan dilakukan pada beberapa entitas dalam satu tahun berjalan. Alokasi penambahan skor adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik lokal.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Capaian indikator ini disajikan pada tabel berikut

Tabel 3.9 Perkembangan Capaian IKU 6  
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal  
Tahun 2020-2024

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	104.00%	100.33%	100.51%	100.51%	100.00%
Capaian	104.00	100.33	100.51	100.51	100.00
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	104.00%	100.33%	100.51%	100.51%	100.00%

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Selain itu, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta selalu berkomitmen bersama antara pimpinan dan pelaksana untuk selalu berusaha mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Realisasi IKU 6 Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 100,51%, meskipun sudah sesuai target. Ketercapaian ini didukung oleh komitmen pimpinan terhadap isu-isu strategis lokal yang perlu mendapat perhatian masyarakat di daerah, dan menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Untuk mempertahankan capaian atas IKU 6 BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta akan berupaya merespon isu-isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian IKU 6 ini adalah sebesar Rp1.598.557.030,00 dari anggaran (setelah perubahan) sebesar Rp1.722.212.000,00 untuk pemeriksaan berikut.

- a. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Sleman dan instansi terkait lainnya;
- b. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan instansi terkait lainnya;
- c. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024 (s.d. 30 September 2024) pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Instansi Terkait Lainnya;
- d. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Realisasi IKU 6 pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang telah mencapai target ini diharapkan dapat menjadi *baseline* atas peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra periode berikutnya.

### **IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK**

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar (Integritas, Independensi dan Profesionalisme) oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Skala hasil survei:

4,00 – 5,00 = sangat baik

3,00 - 3,99 = baik

2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur pemahaman pegawai BPK terhadap nilai dasar BPK. Capaian indikator ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Perkembangan Capaian IKU 7  
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2020-2024

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Sangat memuaskan (5.00)	Sangat memuaskan (5.00)	Sangat memuaskan (5.00)	Sangat memuaskan (5.00)	Sangat memuaskan (4.81)
Realisasi	Sangat memuaskan (5.00)	Sangat memuaskan 4.45	Sangat memuaskan 4.82	Sangat memuaskan 4.87	Sangat memuaskan 4.81
Capaian	100.00	89.00	96.40	97.40	100.00
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	100.00%	89.00%	96.40%	97.40%	100.00%

Realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2024 adalah sebesar 4.81 dari target sebesar 4,81 sehingga capaiannya sebesar 100. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman nilai-nilai dasar pegawai BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah optimal.

Realisasi IKU 7 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 4,87, meskipun sudah sesuai target. Ketercapaian ini didukung oleh komitmen pimpinan dan pegawai BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar BPK dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU 7 BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta akan terus berupaya melakukan sosialisasi secara berkala atas pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK kepada pegawai BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Realisasi IKU 7 pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang telah mencapai target ini diharapkan dapat menjadi *baseline* atas peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra periode berikutnya.

## 7. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP adalah aktifitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, sebagaimana dinyatakan dalam Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (2)).

Evaluasi dilaksanakan dalam dua tahap:

1. *Self-assessment* oleh satuan kerja Eselon I dan Eselon II di lingkungan BPK
2. Evaluasi AKIP oleh Itama atas satuan kerja Eselon I dan/atau Eselon II (sampling).

Predikat penilaian Hasil Evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:

AA (>90 – 100) **Sangat Memuaskan**

Telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk tata Kelola yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform), pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

A (>80 – 90) **Memuaskan**

Terdapat gambaran bahwa satuan kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan tata kelola berorientasi

hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon 4/Pengawas/Subkoordinator

- BB (>70 – 80) Sangat Baik**
- Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 satuan kerja. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon 3/Koordinator.
- B (>60 – 70) Baik**
- Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 satuan kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level Eselon 2.
- CC (>50 – 60) Cukup (Memadai)**
- Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar.
- C (>30 – 50) Kurang**
- Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
- D (>0 – 30) Sangat Kurang**
- Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK. Capaian indikator ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.11 Perkembangan Capaian IKU 8  
Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020-2024

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	A (86)	A (87)	A (88)	A (88)	AA (90.50)
Realisasi	85.82	87.81	89.05	90.50	91.40
Capaian	99.79	100.93	101.19	101.69	101.50
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	94.82%	97.02%	98.39%	100.00%	100.99%

Realisasi IKU hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 adalah sebesar 91,40 dari target sebesar 90,50, sehingga capaiannya sebesar 101,50. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan, antara lain pada komponen Pengukuran Kinerja. BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi kriteria pada komponen Pengukuran Kinerja secara optimal dengan upaya pemanfaatan portal kolaborasi untuk penyampaian data/dokumen dan penggunaan aplikasi PRISMA untuk pengukuran kinerja yang dimonitor secara triwulanan. Selain itu, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah melakukan upaya inovatif, dengan mereplikasi Best Practice "SIPINSET (Sistem Peminjaman Aset) BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta" yang diakui oleh Direktorat PSMK sebagai capaian Indikator Kinerja (IK) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan melalui Nota Dinas No. 43/ND/XII.1/01/2024 tanggal 17 Januari 2024.

Realisasi IKU 8 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 90,50. Ketercapaian tersebut didukung oleh peningkatan kinerja BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berjalan. Peningkatan capaian ini merupakan hasil kerja keras Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan satuan kerja lain yang terkait dalam menindaklanjuti beberapa rekomendasi hasil evaluasi oleh Inspektur Jenderal. Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen akan menjaga capaian IKU ini pada periode tahun-tahun berikutnya.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU 8 BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta akan berupaya terus melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi Inspektur Jenderal atas Implementasi SAKIP.

Realisasi IKU 8 pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang telah mencapai target ini diharapkan dapat menjadi *baseline* atas peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra periode berikutnya.

## **8. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi umum (SISDM, JASMIN), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL). Untuk mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM diukur dengan memperhatikan pemutakhiran data masing-masing pegawai dalam satu Unit/Satuan Kerja pada menu LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai, serta seminar/workshop/ sosialisasi/sejenis. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi JASMIN dan tindak lanjut atas Surat Masuk untuk Pejabat Struktural sampai level Pejabat Struktural Terakhir dalam satu Unit/Satuan Kerja.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP diukur dengan memperhatikan penginputan data pemeriksaan ke aplikasi SMP dalam satu Unit/Satuan Kerja Pemeriksaan. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP diukur dengan memperhatikan pemanfaatan SIAP dalam pemeriksaan Laporan Keuangan (LK), Kinerja, dan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) serta pemanfaatan modul pelaporan SIAP dalam penyusunan LHP. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL diukur dengan memperhatikan status Bahan Tindak Lanjut (TL) yang dikirimkan oleh entitas kepada Unit/Satuan Kerja.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Capaian indikator ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.12 Perkembangan Capaian IKU 9  
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2020-2024

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95.00%	96.00%	97.00%	98.00%	98.00%
Realisasi	99.53%	99.53%	94.70%	98.87%	99,99%
Capaian	104.66	103.68	97.63	100.89	102.04
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	101.56%	101.56%	96.63%	100.88%	102.04%

Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2024 adalah sebesar 99,99% dari target sebesar 98%, sehingga capaiannya sebesar 102.04. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pegawai BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pemanfaatan layanan TI secara optimal.

Realisasi IKU 9 pada Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 98,87. Ketercapaian tersebut didukung oleh terciptanya budaya pemanfaatan layanan TI yang merata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada seluruh pegawai BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pimpinan telah mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU 9 BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta akan berupaya melakukan pemantauan secara berkala dan memerintahkan kepada para pegawai untuk mempertahankan budaya menggunakan aplikasi layanan TI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Realisasi IKU 9 pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang mencapai target ini diharapkan dapat menjadi *baseline* atas peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra periode berikutnya.

## 9. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

*Innovative Practice* menekankan pada inovasi/kebaruan/update atas *Best Practice* yang ada, dan dapat direalisasikan melalui:

- a. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi *Best Practice*. Satuan kerja dapat mengajukan kembali usulan *best practice* yang pernah diajukan pada tahun sebelumnya, dengan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/update. Aspek inovasi/kebaruan/update yang dimaksud dapat berupa peningkatan metode yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
- b. Penerapan *Best Practice* merupakan implementasi atas *Best Practice* yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul *Best Practice*. Satuan kerja yang mengimplementasi *Best Practice* perlu menyusun laporan atas kegiatan implementasi tersebut dan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/update atas *Best Practice* yang diimplementasi.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Capaian indikator ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Perkembangan Capaian IKU10  
Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2020-2024

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	125.00%	100.00%	103.72%	101.43%	106,90%
Capaian	105.00	100.00	103.72	101.43	105.00
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	125.00%	100.00%	103.72%	101.43%	106,90%

Realisasi IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2024 adalah sebesar 106,90% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 105,00. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Realisasi IKU 10 pada Tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 101,43%. Ketercapaian tersebut didukung oleh komitmen para pelaksana kegiatan dalam melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan penyusunan *Best Practice* yaitu "Standar Pelayanan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang pada BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta" dan berbagai macam aktivitas Manajemen Pengetahuan yang telah dilakukan antara lain pendidikan dan pelatihan, kegiatan pembimbingan dan *mentoring*, wawancara berbasis pengetahuan, forum berbagi pengetahuan, *peer assist*, dan *reviu* pasca aktivitas.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU 10, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta akan berupaya menciptakan inovasi sebagai bahan penyusunan *Best Practice*, melakukan replikasi *Best Practice*, dan melakukan berbagai macam kegiatan aktivitas manajemen pengetahuan secara intensif.

Realisasi IKU 10 pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang telah mencapai target ini diharapkan dapat menjadi *baseline* atas peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra periode berikutnya.

## 10. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan.

Skala hasil survei:

4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

3,00 - 3,99 = memuaskan

2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan. Capaian indikator ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Perkembangan Capaian IKU11  
Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi  
Tahun 2020-2024

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
Realisasi	3.83	4.12	3.72	4.01	4.41
Capaian	100.79	105.00	97.89	105.00	105.00
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	101.00%	108.00%	97.89%	105.53%	116.05%

Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2024 adalah sebesar 4,41 dari target sebesar 3,80, sehingga capaian Tahun 2024 sebesar 105.53. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dan kualitas hubungan dengan pemangku kepentingan, serta kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di

lingkungan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah memuaskan dan harus tetap dipertahankan.

Realisasi IKU 11 pada Tahun 2024 mengalami kenaikan atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,01. Ketercapaian tersebut menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan puas dengan kualitas komunikasi melalui sarana-sarana komunikasi yang disediakan oleh BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU 11 BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta akan berupaya meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang baik untuk menciptakan efektivitas dan kualitas hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan di lingkungan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Realisasi IKU 11 pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang telah mencapai target ini diharapkan dapat menjadi *baseline* atas peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra periode berikutnya.

#### **11. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi**

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:

- a. standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun, sebagaimana diatur dalam SPKN.
- b. standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014.
- c. sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.
- d. pengembangan kompetensi yang dimaksud tidak termasuk Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional dan Diklat Kepemimpinan.

*Cut off* perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK. Capaian indikator ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.15 Perkembangan Capaian IKU12  
Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2020-2024

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	100.00%	98.82%	100.00%	100.00%	100.00%
Capaian	100.00	98.82	100.00	100.00	100.00
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	100.00%	98.82%	100.00%	100.00%	100.00%

Realisasi IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian Tahun 2024 sebesar 100. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pegawai BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan memenuhi persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.

Realisasi IKU 12 pada Tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%. Ketercapaian tersebut didukung oleh partisipasi pegawai secara aktif mengikuti diklat sesuai bidangnya. Untuk mempertahankan capaian atas IKU 12 BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta akan berupaya memonitor pegawai dalam memenuhi jam diklat.

Realisasi IKU 12 pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang telah mencapai target ini diharapkan dapat menjadi *baseline* atas peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra periode berikutnya.

## 12. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas perencanaan dan penggunaan anggaran berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 yang dilakukan pada Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri. Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran (EKA Perencanaan Anggaran) merupakan serangkaian proses pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran atas tahun anggaran yang telah selesai dan menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

EKA Perencanaan Anggaran sesuai KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, yang diukur dengan dua variabel, yaitu:

1. Efektivitas, diukur dengan capaian RO (75%)
2. Efisiensi, diukur dari penggunaan SBK (10%) serta efisiensi SBK (15%)

EKA Pelaksanaan Anggaran merupakan rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran. EKA Pelaksanaan Anggaran diukur berdasarkan PMK Nomor 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, meliputi unsur berikut:

1. Revisi DIPA (10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (10%)
3. Penyerapan Anggaran (20%)
4. Belanja Kontraktual (10%)
5. Penyelesaian Tagihan (10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
7. Dispensasi SPM (5%)
8. Capaian output (25%).

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Capaian indikator ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.16 Perkembangan Capaian IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2020-2024

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87.00%	87.50%	88.00%	88.50%	84.50%
Realisasi	92.05%	91.06%	89.34%	91,04%	91,94%
Capaian	105,00	104,07	101,52	102,87	105,00
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	108,93%	107,76%	105,72%	107,73%	108,80%

Realisasi IKU Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar 91,94% dari target sebesar 84,50%, sehingga capaian Tahun 2024 sebesar 105,00. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan.

Realisasi IKU 13 pada Tahun 2024 mengalami kenaikan atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 91,04%. Ketercapaian tersebut didukung oleh adanya dampak dari upaya perbaikan kinerja anggaran yang telah dilakukan oleh Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain:

- a. meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran antar unit kerja;
- b. menyusun Rencana Penarikan Dana secara lebih cermat dengan mempertimbangkan kepastian pelaksanaan rencana kegiatannya;
- c. melakukan revisi anggaran secara lebih cermat.

Untuk meningkatkan capaian atas IKU 13 BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta akan terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja anggaran dengan melakukan pengelolaan anggaran yang baik dan terencana serta memperhatikan efisiensi anggaran.

Realisasi IKU 13 pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang telah mencapai target ini diharapkan dapat menjadi *baseline* atas peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra periode berikutnya.

### **C. Analisis Efisiensi**

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Strategi 2 – Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi serta memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder* dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN dan anggaran, sebagaimana diuraikan berikut.

#### **1. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Selama Tahun 2024 BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan efisiensi pemanfaatan TI antara lain:

- a. pemanfaatan tanda tangan digital dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan sehingga menjadi lebih efisien dan lebih cepat;
- b. penggunaan aplikasi BPK diantaranya Jasmin, SiAP LK dan SiPTL memberikan manfaat efisiensi anggaran untuk ATK, efisiensi waktu dan kecepatan pelayanan; dan
- c. pemanfaatan materai elektronik (e-materai) untuk dokumen digital.

## 2. Pengelolaan BMN

Selama Tahun 2024 BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan penghapusan BMN yang tidak digunakan lagi dengan kondisi rusak berat. Adapun daftar BMN yang dihapuskan adalah sebagai berikut:

- a. *software komputer Adobe acrobat full license* Tahun Perolehan 2015 dengan harga perolehan Rp7.595.500,00;
- b. *software komputer Adobe acrobat full license* Tahun Perolehan 2015 dengan harga perolehan Rp7.595.500,00;
- c. enam Lisensi IDES DATA ANALYSIS VER.8 Tahun Perolehan 2012 dengan harga perolehan Rp10.276.409,00;
- d. dua puluh Lisensi Microsoft Office 2013 Tahun Perolehan 2015 dengan harga perolehan Rp3.254.900,00.

## 3. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Selama Tahun 2024 BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran berupa:

- a. perubahan kebijakan penugasan pemantauan kerugian daerah yang semula direncanakan secara penugasan luar kota menjadi penugasan dalam kota;
- b. revisi belanja pegawai untuk satuan kerja yang membutuhkan pada Triwulan III Tahun 2024.

## **D. Perubahan Budaya Kerja**

Dalam rangka mendukung ketercapaian kinerja Tahun 2024, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta mengembangkan budaya kerja SIIP yang merupakan singkatan dari Sinergi, Ikhlas, Inovatif, dan Prestasi. Sinergi adalah membangun hubungan kerjasama yang baik dan menghasilkan keseimbangan yang harmonis untuk menghasilkan output yang maksimal.

Ikhlas adalah melakukan pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela dan merupakan bentuk ucapan syukur atas karunia Allah. Inovatif adalah usaha untuk melakukan suatu kegiatan dengan pemikiran yang kreatif, menciptakan sesuatu yang baru, berguna dan mempunyai dampak bagi lingkungan sekitar. Prestasi adalah pencapaian dari apa yang dikerjakan atau diusahakan yang bermanfaat.

Budaya kerja yang dimiliki oleh BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mengubah mekanisme kerja dan pola pikir pegawai agar tidak resisten dan *agile* terhadap perubahan serta dapat meningkatkan kinerja untuk menghadapi tantangan di masa datang.

### E. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2024, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh anggaran (setelah perubahan) sebesar Rp20.816.514.000,00. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp20.417.696.574,00 atau sebesar 98,08% dengan output sebanyak 168, sebagaimana dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Keluaran	Anggaran (Setelah Perubahan)	Realisasi Anggaran	Realisasi Rincian Output	Indikator Kinerja
<b>Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara</b>					
1	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan	81.520.000,00	80.822.140,00	51	
2	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	8.226.000,00	2.000.000,00	1	
3	Sumbangan IHPS Perwakilan	24.958.000,00	24.952.338,00	2	
4	Laporan Profil Entitas Perwakilan	4.560.000,00	4.560.000,00	6	
5	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan	115.884.000,00	101.475.000,00	12	IKU 3
6	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan	38.196.000,00	17.700.000,00	12	IKU 3
7	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	255.142.000,00	250.400.865,00	12	IKU 5

No	Keluaran	Anggaran (Setelah Perubahan)	Realisasi Anggaran	Realisasi Rincian Output	Indikator Kinerja
8	LHP BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta	5.661.509.000,00	5.430.012.428,00	14	IKU 1 IKU 2 IKU 4 IKU 6
9	Sarana Bidang Teknologi Infromasi dan Komunikasi	141.000.000,00	139.500.000,00	13	
10	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12.658.369.000,00	12.563.291.085,00	1	
10	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12.658.369.000,00	12.563.291.085,00	1	
11	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	183.677.000,00	183.317.999,00	23	
12	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.643.473.000,00	1.619.664.719,00	21	
	<b>Total</b>	<b>20.816.514.000,00</b>	<b>20.417.696.574,00</b>	<b>168</b>	

Tabel 3.17 menunjukkan bahwa realisasi anggaran telah secara optimal mendukung sepenuhnya capaian kinerja BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

## F. Inovasi

BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas organisasi dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan beberapa terobosan berupa inovasi-inovasi pelayanan yaitu :

1. Standar Pelayanan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang pada BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagai bagian dari perbaikan pelayanan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) dan peningkatan kinerja pelayanannya, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun pedoman dan prosedur untuk meningkatkan tata kelola pelayanan. Pelayanan PKL/magang merupakan sarana pelayanan bagi pelajar SMK/setara atau mahasiswa maupun masyarakat yang bermaksud melaksanakan magang pada Kantor BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Standar Pelayanan Magang pada BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan acuan bagi para pelaksana pada BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

sebagai penyedia layanan maupun bagi pengguna layanan di Lingkungan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan Standar Pelayanan ini yaitu menjadi pedoman bagi seluruh pegawai/unit kerja di lingkungan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung capaian pelayanan PIK yang optimal dan memberikan pemahaman kepada publik/masyarakat umum mengenai mekanisme/tata cara dalam memperoleh pelayanan.

2. OBSESIKU (Optimalisasi Bukti Tindak lanjut melalui Formulir Rencana Aksi dalam rangka Meningkatkan Capaian Indikator Kinerja Utama)

Melalui OBSESIKU, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta memodifikasi formulir *action plan* dengan mencantumkan jenis dan bukti tindak lanjut yang diharapkan. Formulir *action plan* merupakan dokumen pemeriksaan yang menjadi media untuk mendapatkan kesepahaman entitas terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan.

3. DISTINDAL (Diskusi Intensif Tindak Lanjut)

Untuk meningkatkan persentase tindak lanjut secara maksimal, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan evaluasi dengan cara Diskusi Intensif Tindak Lanjut kepada masing-masing entitas bersama dengan Tim dari BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang semula dilakukan semesteran menjadi mingguan secara daring. Capaian yang diraih sebagai hasil diskusi intensif tersebut bahwa persentase penyelesaian TLRHP pada Tahun 2021 di atas 92% untuk masing-masing entitas.

Sebagai data pendukung dengan adanya inovasi OBSESIKU dan DISTINDAL, terlihat pada Tahun 2018 s.d. 2024, persentase Penyelesaian TLRHP sebagai berikut.

Tabel 3.18 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2018 s.d. 2024

Entitas	2024 (%)	2023 (%)	2022 (%)	2021 (%)	2020 (%)	2019 (%)	2018 (%)
Pemda D.I Yogyakarta	90,58	88,61	91,74	92,71	81,77	77,22	75,54
Kota Yogyakarta	98,69	96,38	93,99	92,27	75,34	69,10	71,92
Kabupaten Sleman	95,27	95,89	95,03	92,47	81,60	80,33	80,32
Kabupaten Kulon Progo	95,42	92,38	96,49	93,89	89,82	90,65	87,64
Kabupaten Bantul	96,33	95,43	94,62	93,59	86,94	86,50	80,91
Kabupaten Gunungkidul	98,59	98,75	95,47	94,75	94,36	93,91	92,46

#### 4. Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Dalam rangka mendorong efektivitas penyelesaian kerugian negara/daerah dan memberikan informasi yang akurat, transparan dan terpadu kepada pemangku kepentingan tentang kerugian negara/daerah, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta membuat inovasi dengan Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Sekretariat PPKN). Sekretariat PPKN dibentuk untuk membantu kegiatan Kepaniteraan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dalam pelaksanaan wewenang Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK. Sekretariat PPKN telah membantu percepatan penyelesaian 1 kasus pada Tahun 2018 dan Tahun 2020 diajukan kembali ke Majelis Tuntutan Perbendaharaan sebanyak 5 kasus dan hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian di Majelis TP.

#### 5. Pencantuman Kode Etik dalam Surat Tugas Pemeriksaan

Sebagai salah satu bentuk pengendalian atas tugas pokok pemeriksa yang menjalankan tugas pemeriksaan, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta mencantumkan ketentuan kode etik pemeriksa pada surat tugas pemeriksaan. Untuk menguatkan kode etik, setiap hari Senin dan Rabu dilakukan pemutaran rekaman terkait kode etik pemeriksa sesuai Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan dengan harapan pemeriksa selalu menegakkan independensi, integritas dan profesionalisme, tidak menerima, memberi dan meminta gratifikasi dan melaporkan setiap penerimaan, pemberian, permintaan dan penolakan gratifikasi.

#### 6. Pembelajaran Magang untuk Pelajar/Mahasiswa.

Dalam rangka pemenuhan permintaan publik atas pelayanan pemagangan untuk para mahasiswa dan pelajar, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta membuat Inovasi Pemagangan. Inovasi ini memberikan pelayanan kepada pihak eksternal terutama mahasiswa dan pelajar SMK bagi yang ingin magang pembelajaran di instansi BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemagang mendapatkan materi magang yang standar berupa buku panduan/modul bagi para magang sehingga setelah magang berakhir mendapatkan output yang seragam dan bermanfaat.

7. Layanan permintaan informasi dan pengaduan melalui media *Whatsapp*  
Untuk meningkatkan pelayanan publik yang digunakan dalam meraih kepercayaan masyarakat, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta membuat inovasi yaitu layanan permintaan informasi dan pengaduan melalui media *Whatsapp* di nomor 0822 600 600 52. Media ini digunakan oleh pelaksana pada BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masyarakat, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berkomunikasi. Penggunaan nomor WA PIK yang mudah diingat memberikan kemudahan bagi pengguna layanan baik pemohon informasi maupun pelayanan pengaduan masyarakat.

## **G. Penghargaan**

Selama Tahun 2024 BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh penghargaan antara lain:

- 1) Penghargaan Terbaik ketiga kategori Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) satuan kerja;
- 2) Penghargaan Terbaik ketiga Inovasi SDM Tahun 2024.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2024 BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPK RI. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Pencapaian skor kinerja Tahun 2024 sebesar 100,43 mengalami penurunan sebesar 0.20 poin, dibandingkan Tahun 2023 dengan skor kinerja sebesar 100,63. Namun, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta bertekad untuk terus meningkatkan capaian kinerja dengan berbagai upaya maksimal.

Komitmen yang kuat untuk mencapai kinerja yang maksimal tergambar pada capaian indikator kinerja berikut.

1. IKU 2 (Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan)
2. IKU 3 (Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan)
3. IKU 4 (Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional)
4. IKU 5 (Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan)
5. IKU 6 (Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal)
6. IKU 7 (Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK)
7. IKU 8 (Hasil Evaluasi AKIP)
8. IKU 9 (Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi)
9. IKU 10 (Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan)
10. IKU 11 (Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi)
11. IKU 12 (Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi)
12. IKU 13 (Tingkat Kinerja Anggaran)

Sedangkan indikator kinerja yang belum mencapai target adalah IKU 1 (Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu). Hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut yakni para pegawai BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta kurang teliti dalam mencapai pemenuhan

pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan sehingga tingkat konsistensi LHP belum optimal.

Atas indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan langkah-langkah atau rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dengan cara lebih cermat dalam proses QA dan QC atas konsep LHP untuk memperoleh ketepatan akurasi dan konsistensi penyajian LHP;
2. Membentuk Tim Reviu LHP yang melakukan reviu secara menyeluruh, memastikan kesesuaian akurasi angka dan konsistensi penyajian dan penulisan pada Kosep LHP sesuai dengan Juknis;
3. Meningkatkan kecermatan dalam melakukan evaluasi berjenjang.

BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi melalui pemenuhan seluruh indikator kinerja dengan mengacu pada Renstra BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024. Seluruh upaya-upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diharapkan mampu meningkatkan kualitas organisasi dan mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kinerja di masa mendatang, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Untuk IKU yang belum mencapai target yang ditetapkan, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta akan terus meningkatkan langkah-langkah pencapaiannya;
2. Untuk IKU yang telah mencapai maupun melampaui target yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta akan terus memotivasi diri baik pimpinan maupun seluruh pegawai untuk terus berupaya meningkatkan kinerja di tahun mendatang;

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja satuan kerja, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan keputusan dan kebijakan oleh Pimpinan BPK.

# LAMPIRAN



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI D. I. YOGYAKARTA

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widhi Widayat, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.  
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi D. I. Yogyakarta

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Slamet Kurniawan, M.Sc., Ak., CSFA., CPA., CFrA., ERMCP,  
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara V

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D. I. Yogyakarta Tahun 2024. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.



## INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran		Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp20.837.759.000	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	Rp5.912.642.000	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Rp14.925.117.000	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
• Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp14.925.117.000	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4,81)
		8 Hasil Evaluasi AKIP	AA (90,05)
		9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
		10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13 Tingkat Kinerja Anggaran	84,50%

Jakarta, Desember 2023

**Pihak Kedua,**



**Dr. Slamet Kurniawan, M.Sc., Ak., CSFA., CPA., CFA., ERMCP.**

**Pihak Pertama,**



**Widhi Widayat, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.**

## Laporan Bulanan Satker Tahun 2024

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

Bulan 12

No	Kode	Program/Kegiatan/Keluaran/Subkeluaran	Kegiatan					Anggaran						
			Target (Vol.)	Realisasi (Vol.)	Sisa (Vol.)	Satuan Keluaran	Penyelesaian (%)	Deskripsi	Rencana	RPD	Realisasi s.d. Bulan Ini (Rp)	Realisasi s.d. Bulan Ini (%)		
	CI	Program Pemeriksaan Keuangan Negara								20.816.514.000	2.935.595.494	2.489.648.096	20.417.696.574	98,08%
1	1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara								20.816.514.000	2.935.595.494	2.489.648.096	20.417.696.574	98,08%
	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi								141.000.000	0	0	139.500.000	98,94%
	001	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	13	13	0	Unit	100,00%			141.000.000	0	0	139.500.000	98,94%
	051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi								141.000.000		0	139.500.000	98,94%
	A	Tanpa Subkomponen								141.000.000		0	139.500.000	98,94%
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								141.000.000		0	139.500.000	98,94%
2	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	1	0	Layanan	100,00%			12.658.369.000	1.125.942.000	1.098.266.739	12.563.291.085	99,25%
	994	Layanan Perkantoran	1	1	0	Layanan	100,00%			12.658.369.000	1.125.942.000	1.098.266.739	12.563.291.085	99,25%
	001	Gaji dan Tunjangan								8.105.615.000		580.000.223	8.020.405.896	98,95%
	A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan								8.105.615.000		580.000.223	8.020.405.896	98,95%
	511111	Belanja Gaji Pokok PNS								5.415.588.000		393.268.500	5.410.863.240	99,91%
	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS								73.000		4.985	70.770	96,95%
	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS								380.804.000		27.643.320	380.670.630	99,96%
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS								129.942.000		8.767.364	129.494.690	99,66%
	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS								99.120.000		8.470.000	99.120.000	100,00%
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS								814.598.000		67.380.000	814.598.000	100,00%
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS								99.587.000		1.351.514	74.046.110	74,35%
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS								273.460.000		19.118.880	272.878.560	99,79%
	511129	Belanja Uang Makan PNS								627.254.000		43.845.000	573.737.000	91,47%
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS								720.000		0	720.000	100,00%
	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK								88.754.000		6.407.200	88.752.400	100,00%
	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK								4.000		76	928	23,20%
	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK								8.876.000		640.720	8.875.240	99,99%
	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK								1.777.000		128.144	1.775.048	99,89%
	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK								12.720.000		1.060.000	12.720.000	100,00%
	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK								6.085.000		434.520	6.083.280	99,97%
	511628	Belanja Uang Makan PPPK								17.985.000		1.480.000	17.760.000	98,75%
	512211	Belanja uang lembur								128.268.000		0	128.240.000	99,98%
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor								4.552.754.000		518.266.516	4.542.885.189	99,78%
	A	Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan								584.239.000		26.580.045	579.030.536	99,11%
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran								238.220.000		1.535.305	237.596.099	99,74%
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya								16.246.000		0	16.011.400	98,56%
	522141	Belanja Sewa								48.729.000		0	48.729.000	100,00%
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								260.644.000		23.004.740	256.294.037	98,33%
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								20.400.000		2.040.000	20.400.000	100,00%
	B	Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan								38.400.000		6.400.000	38.400.000	100,00%
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja								38.400.000		6.400.000	38.400.000	100,00%
	C	Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia								298.500.000		0	298.498.950	100,00%
	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya								200.007.000		0	200.005.950	100,00%
	522191	Belanja Jasa Lainnya								98.493.000		0	98.493.000	100,00%
	D	Layanan Perkantoran Bidang Keuangan								110.492.000		18.504.000	110.012.000	99,57%
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja								110.492.000		18.504.000	110.012.000	99,57%
	E	Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI								3.420.908.000		428.570.371	3.419.843.653	99,97%
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran								184.436.000		26.933.988	184.138.122	99,84%
	521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat								4.096.000		85.620	3.909.900	95,46%
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi								70.720.000		0	70.707.600	99,98%
	522111	Belanja L朗ganan Listrik								535.300.000		45.141.379	535.262.448	99,99%
	522112	Belanja L朗ganan Telepon								17.100.000		1.398.848	17.040.069	99,65%
	522113	Belanja L朗ganan Air								10.800.000		733.000	10.730.300	99,35%
	522141	Belanja Sewa								23.800.000		3.940.000	23.699.900	99,58%
	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan								1.709.767.000		240.106.400	1.709.640.001	99,99%
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin								541.357.000		79.686.136	541.303.313	99,99%
	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin								323.532.000		30.545.000	323.412.000	99,96%
	F	Layanan Dukungan Kesekretariatan Perwakilan								100.215.000		38.212.100	97.100.050	96,89%
	521211	Belanja Bahan								32.910.000		3.405.000	32.919.750	100,00%
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								50.295.000		17.807.100	47.180.300	93,81%
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								17.000.000		17.000.000	17.000.000	100,00%
3	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	23	23	0	Unit	100,00%			183.677.000	15.000.000	0	183.317.999	99,80%
	951	Layanan Sarana Internal	23	23	0	Unit	100,00%			183.677.000	15.000.000	0	183.317.999	99,80%
	052	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran								183.677.000		0	183.317.999	99,80%
	A	Tanpa Subkomponen								183.677.000		0	183.317.999	99,80%
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								168.677.000		0	168.332.000	99,80%
	536111	Belanja Modal Lainnya								15.000.000		0	14.985.999	99,91%
4	FAF	Pemeriksaan Keuangan Negara	131	131	0	Laporan	100,00%			7.833.468.000	1.794.653.494	1.391.381.357	7.531.587.490	96,15%
	051	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan	51	51	0	LHP	100,00%			81.520.000	697.860	0	80.822.140	99,14%
	051	Melaksanakan Pemeriksaan Banparpol								81.520.000		0	80.822.140	99,14%
	A	Tanpa Subkomponen								81.520.000		0	80.822.140	99,14%
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya								30.610.000		0	30.393.000	99,29%
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								50.910.000		0	50.429.140	99,06%
	083	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1	1	0	Laporan	100,00%			8.226.000	8.226.000	2.000.000	2.000.000	24,31%
	051	Menyusun Bahan Rumusan Pendapat								8.226.000		2.000.000	2.000.000	24,31%
	A	Tanpa Subkomponen								8.226.000		2.000.000	2.000.000	24,31%
	521211	Belanja Bahan								2.000.000		2.000.000	2.000.000	100,00%
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								6.226.000		0	0	0,00%
	091	Sumbangan IHPs Perwakilan	2	2	0	Laporan	100,00%			24.958.000	5.662	0	24.952.338	99,98%
	051	Menyusun Sumbangan IHPs								24.958.000		0	24.952.338	99,98%
	A	Tanpa Subkomponen								24.958.000		0	24.952.338	99,98%
	521211	Belanja Bahan								2.500.000		0	2.500.000	100,00%
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								22.458.000		0	22.452.338	99,97%
	099	Laporan Profil Entitas Perwakilan	6	6	0	Laporan	100,00%			4.560.000	0	4.560.000	4.560.000	100,00%
	051	Menyusun Laporan Profil Entitas								4.560.000		4.560.000	4.560.000	100,00%
	A	Tanpa Subkomponen								4.560.000		4.560.000	4.560.000	100,00%
	521211	Belanja Bahan								4.560.000		4.560.000	4.560.000	100,00%
	116	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BPK Perwakilan	12	12	0	Laporan	100,00%			115.884.000	63.484.500	49.075.500	101.475.000	87,57%
	051	Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan								115.884.000		49.075.500	101.475.000	87,57%
	A	Tanpa Subkomponen								115.884.000		49.075.500	101.475.000	87,57%
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya								115.884.000		49.075.500	101.475.000	87,57%
	124	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah pada BPK Perwakilan	12	12	0	Laporan	100,00%							

051	Melaksanakan Dukungan Manajemen Pemeriksaan					255.142.000		69.335.620	250.400.865	98,14%	
A	Melaksanakan Layanan Dukungan Administrasi Pemeriksaan					159.294.000		45.982.620	155.772.385	97,79%	
521211	Belanja Bahan					68.856.000		39.410.100	66.093.000	95,99%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					86.688.000		5.042.520	86.449.385	99,72%	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.750.000		1.530.000	3.230.000	86,13%	
B	Melaksanakan Konsultasi/Koordinasi/ Bimbingan Teknis Pemeriksaan					57.348.000		2.000.000	57.331.780	99,97%	
521211	Belanja Bahan					2.000.000		2.000.000	2.000.000	100,00%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					55.348.000		0	55.331.780	99,97%	
C	Melaksanakan Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					35.000.000		19.253.000	34.414.100	98,33%	
521211	Belanja Bahan					35.000.000		19.253.000	34.414.100	98,33%	
D	Melaksanakan Reviu atas Hasil Pemeriksaan					1.000.000		0	782.600	78,26%	
521211	Belanja Bahan					1.000.000		0	782.600	78,26%	
E	Melaksanakan Pengelolaan Manajemen SIKAD					2.500.000		2.100.000	2.100.000	84,00%	
521211	Belanja Bahan					2.500.000		2.100.000	2.100.000	84,00%	
175	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	21	21	0	Laporan	100,00%	1.643.473.000	300.465.665	297.987.508	1.619.664.719	98,55%
051	Melaksanakan Layanan Tata Usaha					65.948.000		12.848.200	65.401.355	99,17%	
A	Tanpa Subkomponen					65.948.000		12.848.200	65.401.355	99,17%	
521211	Belanja Bahan					11.260.000		1.978.200	11.254.030	99,95%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					50.608.000		10.870.000	50.067.325	98,93%	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					4.080.000		0	4.080.000	100,00%	
052	Melaksanakan Layanan Kehumasan					152.994.000		39.908.100	151.990.465	99,34%	
A	Tanpa Subkomponen					152.994.000		39.908.100	151.990.465	99,34%	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran					9.740.000		1.005.000	9.732.000	99,92%	
521211	Belanja Bahan					87.438.000		26.554.700	87.416.100	99,97%	
522151	Belanja Jasa Profesi					1.800.000		1.800.000	1.800.000	100,00%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					43.816.000		7.490.400	42.842.365	97,78%	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					10.200.000		3.060.000	10.200.000	100,00%	
053	Melaksanakan Layanan Sumber Daya Manusia					299.820.000		62.654.000	299.816.682	100,00%	
A	Melaksanakan Administrasi Kepegawalan dan Jabatan Fungsional					299.820.000		62.654.000	299.816.682	100,00%	
521211	Belanja Bahan					118.760.000		46.010.000	118.760.000	100,00%	
522191	Belanja Jasa Lainnya					21.480.000		0	21.480.000	100,00%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					153.970.000		15.454.000	153.966.682	100,00%	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					5.610.000		1.190.000	5.610.000	100,00%	
054	Melaksanakan Layanan Keuangan					352.002.000		55.405.200	351.999.418	100,00%	
A	Menyusun Dokumen Penganggaran dan Pemantauan					352.002.000		55.405.200	351.999.418	100,00%	
521211	Belanja Bahan					114.750.000		8.492.100	114.747.850	100,00%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					227.052.000		46.743.100	227.051.568	100,00%	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					10.200.000		170.000	10.200.000	100,00%	
055	Melaksanakan Layanan Umum dan TI					349.652.000		25.607.498	348.954.023	99,80%	
A	Melaksanakan Layanan Administrasi Umum					349.652.000		25.607.498	348.954.023	99,80%	
521211	Belanja Bahan					126.684.000		0	126.656.745	99,98%	
522191	Belanja Jasa Lainnya					58.500.000		3.896.100	58.197.210	99,48%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					152.908.000		18.991.398	152.540.068	99,76%	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					11.560.000		2.720.000	11.560.000	100,00%	
056	Melaksanakan Layanan Hukum					144.020.000		23.735.720	143.842.835	99,88%	
A	Tanpa Subkomponen					144.020.000		23.735.720	143.842.835	99,88%	
521211	Belanja Bahan					16.600.000		0	16.453.100	99,12%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					124.360.000		23.735.720	124.329.735	99,98%	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.060.000		0	3.060.000	100,00%	
057	Melaksanakan Dukungan Pembinaan Pimpinan BPK					254.065.000		69.568.790	232.863.892	91,66%	
A	Tanpa Subkomponen					254.065.000		69.568.790	232.863.892	91,66%	
521211	Belanja Bahan					145.925.000		64.933.790	144.035.792	98,71%	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					52.500.000		4.125.000	51.491.000	98,08%	
522141	Belanja Sewa					43.400.000		0	25.097.100	57,83%	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					12.240.000		510.000	12.240.000	100,00%	
058	Melaksanakan Manajemen Internal Perwakilan					24.972.000		8.260.000	24.796.049	99,30%	
A	Melaksanakan Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko					9.103.000		0	9.036.049	99,26%	
521211	Belanja Bahan					2.136.000		0	2.136.000	100,00%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					6.967.000		0	6.900.049	99,04%	
B	Menyusun Laporan Manajemen Pengetahuan					15.869.000		8.260.000	15.760.000	99,31%	
521211	Belanja Bahan					15.760.000		8.260.000	15.760.000	100,00%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					109.000		0	0	0,00%	
U22	LHP BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	14	14	0	LHP	100,00%	5.661.509.000	1.330.179.646	962.262.729	5.430.012.428	95,91%
051	Menyusun Perencanaan Pemeriksaan					52.750.000		4.285.000	25.265.350	47,90%	
A	Tanpa Subkomponen					52.750.000		4.285.000	25.265.350	47,90%	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					43.750.000		4.285.000	20.465.350	46,78%	
522151	Belanja Jasa Profesi					9.000.000		0	4.800.000	53,33%	
052	Melaksanakan Pemeriksaan Interim/Pendahuluan					2.416.079.000		250.205.600	2.337.970.289	96,77%	
A	Tanpa Subkomponen					2.416.079.000		250.205.600	2.337.970.289	96,77%	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					364.370.000		94.335.000	353.630.000	97,05%	
522191	Belanja Jasa Lainnya					94.544.000		0	93.075.359	98,45%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					1.957.165.000		155.870.600	1.891.264.930	96,63%	
053	Melaksanakan Pemeriksaan					2.892.799.000		552.159.099	2.810.467.484	97,15%	
A	Tanpa Subkomponen					2.892.799.000		552.159.099	2.810.467.484	97,15%	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					435.746.000		142.520.000	421.280.000	96,68%	
522191	Belanja Jasa Lainnya					126.000.000		54.448.000	122.725.682	97,40%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.331.053.000		355.191.099	2.266.461.802	97,23%	
054	Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan					299.881.000		155.613.030	256.309.305	85,47%	
A	Tanpa Subkomponen					299.881.000		155.613.030	256.309.305	85,47%	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					91.945.000		37.318.000	88.914.275	96,70%	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					74.850.000		0	49.100.000	65,60%	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					133.086.000		118.295.030	118.295.030	88,89%	

**TABEL TARGET INDIKATOR KINERJA DALAM LIMA TAHUN SESUAI RENSTRA**

Sasaran	Sasaran Kegiatan	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas</li> <li>Meningkatnya Layanan Pemeriksaan</li> </ul>	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)				
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (87,25)	A (87,50)	A (87,75)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)				
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	89,7%

# BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

## RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

**Unit/Satuan Kerja : BPK PERWAKILAN D.I. YOGYAKARTA**  
**Tahun : 2024**

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Strategi 2</b> Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
<b>Sasaran</b> Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	40%	40%	40%	100%	<p><b>Desember</b></p> <p><b>Januari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk Tim Kerja Opini;</li> <li>• Melaksanakan diklat teknis persiapan pemeriksaan LKPD;</li> <li>• Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP);</li> </ul> <p><b>Februari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci LKPD TA 2023 atas 2 entitas dalam rangka mendukung penilaian evaluasi EPP;</li> <li>• Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapring dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester I;</li> </ul> <p><b>Maret</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Pemenuhan QA dan QC dalam pemeriksaan Terinci LKPD TA 2023 atas 4 entitas dalam rangka mendukung penilaian</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<p>evaluasi EPP;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapring dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester I;</li> </ul> <p><b>April</b> Melakukan evaluasi pemeriksaan.</p> <p><b>Mei</b> Melakukan evaluasi pemeriksaan.</p> <p><b>Juni</b> Melakukan evaluasi pemeriksaan.</p> <p><b>Juli</b> Merencanakan kegiatan pemeriksaan kinerja Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP</p> <p><b>Agustus</b> Merencanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP</p> <p><b>September</b> Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kinerja Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).</p> <p><b>Oktober</b> Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kinerja Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).</p> <p><b>November</b> Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kinerja Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC)</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
							<p>Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).</p> <p><b>Desember</b> Melaksanakan pemenuhan <i>QA dan QC</i> atas Pemeriksaan Kinerja, Pemeriksaan Kepatuhan dan Pemeriksaan Interim pada Semester II Tahun 2024 dalam rangka mendukung penilaian Evaluasi EPP.</p>	
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	0%	0%	0%	100%	<p><b>Desember</b></p> <p><b>Januari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2024</li> <li>Membentuk Tim <i>Revu Optisi</i>;</li> </ul> <p><b>Februari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan konsinyering pemeriksaan untuk menerangkan <i>equal treatment</i> atas permasalahan yang sama.</li> </ul> <p><b>Maret</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan konsinyering pemeriksaan untuk menerangkan <i>equal treatment</i> atas permasalahan yang sama.</li> </ul> <p><b>April</b></p> <p>-</p> <p><b>Mei</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Semester II Tahun 2024.</li> </ul> <p><b>Juni</b></p> <p>-</p> <p><b>Juli</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi pemeriksaan.</li> <li>Merencanakan kegiatan pemeriksaan kinerja, pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan interim pada Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP</li> </ul>	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
							<p>Agustus Merencanakan kegiatan pemeriksaan kinerja, pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan interim pada Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.</p> <p><b>September</b> Melaksanakan pemeriksaan Kinerja, pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan interim pada Semester II</p> <p><b>Oktober</b> Melaksanakan pemeriksaan Kinerja, pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan interim pada Semester II</p> <p><b>November</b> Melaksanakan pemeriksaan Kinerja, pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan interim pada Semester II</p> <p><b>Desember</b> Melaksanakan konsinyering pemeriksaan untuk menerangkan <i>equal treatment</i> atas permasalahan yang sama.</p>	
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	<p><b>Desember</b></p> <p><b>Januari</b> Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p> <p><b>Februari</b> Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p> <p><b>Maret</b> Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p>	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p><b>April</b> Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p> <p><b>Mei</b> Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p> <p><b>Juni</b> Melaksanakan pemantauan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL.</p> <p><b>Juli</b> Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p> <p><b>Agustus</b> Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p> <p><b>September</b> Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p> <p><b>Oktober</b> Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p><b>November</b> Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p> <p><b>Desember</b> Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL.</p>
IKU 4	Tingkat Berpemahaman, Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	50%	100%	<b>Desember</b>	<p><b>Januari</b> Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional;</p> <p><b>Februari</b> Mengidentifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional.</p> <p><b>Maret</b> Mengidentifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional.</p> <p><b>April</b> Menyusunkan hasil identifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional untuk selanjutnya diusulkan sebagai salah satu fokus pemeriksaan Semester II Tahun 2024.</p> <p><b>Mei</b> -</p> <p><b>Juni</b> -</p> <p><b>Juli</b> Menyusun usulan tim pemeriksaan;</p> <p><b>Agustus</b> Mengikuti workshop persiapan pemeriksaan.</p> <p><b>September</b> Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
							<p><b>Oktober</b> Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci</p> <p><b>November</b> Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci</p> <p><b>Desember</b> • Diskusi pelaporan hasil pemeriksaan; dan • Pembahasan rencana aksi dalam melaksanakan rekomendasi</p>	
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	<p><b>Desember</b></p> <p><b>Januari</b> • Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan • Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan</p> <p><b>Februari</b> Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> <p><b>Maret</b> Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> <p><b>April</b> Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> <p><b>Mei</b> Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> <p><b>Juni</b> Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p>	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
							<p><b>Juli</b> Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> <p><b>Agustus</b> Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> <p><b>September</b> Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> <p><b>Oktober</b> Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> <p><b>November</b> Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> <p><b>Desember</b> Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p>	
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	50%	100%	<p><b>Desember</b></p> <p><b>Januari</b> Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional;</p> <p><b>Februari</b> Mengidentifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional.</p>	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p><b>Maret</b> Mengidentifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional.</p> <p><b>April</b> Mengusulkan hasil identifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional untuk selanjutnya diusulkan sebagai salah satu fokus pemeriksaan Semester II Tahun 2023.</p> <p><b>Mei</b> -</p> <p><b>Juni</b> -</p> <p><b>Juli</b> Menyusun usulan tim pemeriksaan;</p> <p><b>Agustus</b> Mengikuti workshop persiapan pemeriksaan.</p> <p><b>September</b> Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci</p> <p><b>Oktober</b> Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci</p> <p><b>November</b> Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci</p> <p><b>Desember</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi pelaporan hasil pemeriksaan; dan</li> <li>Berdasarkan rencana aksi dalam melaksanakan rekomendasi</li> </ul> </p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4,81)	-	-	-	Sangat Memuaskan (4,81)	Desember	<p><b>Januari</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksa dan monitoring pengusutan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut-turut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan pengusutan pemeriksaan LKPD;</li> <li>Pengarahan Kepala Perwakilan terkait Integritas, Independen dan Profesionalisme;</li> <li>Mencantumkan nilai-nilai dasar dalam Surat Tugas;</li> <li>Pakta Integritas seluruh Tim Pemeriksa saat pemeriksaan terinci LKPD</li> </ul> </p> <p><b>Februari</b> Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait nilai dasar BPK serta budaya kerja</p> <p><b>Maret</b> -</p> <p><b>April</b> -</p> <p><b>Mei</b> -</p> <p><b>Juni</b> Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait nilai dasar BPK serta budaya kerja;</p> <p><b>Juli</b> -</p> <p><b>Agustus</b> -</p> <p><b>September</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait nilai dasar BPK serta budaya kerja;</li> <li>Mencantumkan nilai-nilai dasar dalam Surat Tugas;</li> </ul> </p> <p><b>Oktober</b> Memperiapkan seluruh pegawai dalam mengikuti survei Implementasi Nilai Dasar</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							November -	
							Desember -	
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (90,05)	-	-	-	A (90,05)	Desember	<p><b>Januari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2024;</li> <li>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</li> </ul> <p><b>Februari</b></p> <p>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</p> <p><b>Maret</b></p> <p>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</p> <p><b>April</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun <b>Laporan Revisi Pencapaian Kinerja Triwulan I</b>;</li> <li>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</li> <li>Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I tahun 2023 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasarkan hasil evaluasi;</li> </ul> <p><b>Mei</b></p> <p>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</p> <p><b>Juni</b></p> <p>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</p> <p><b>Juli</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</li> <li>Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan II tahun 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasarkan hasil evaluasi;</li> <li>Menyusun <b>Laporan Revisi Pencapaian Kinerja Triwulan II</b> dengan memperhatikan capaian kinerja pada Triwulan I yang belum tercapai;</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Agustus	Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;
							September	Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;
							Oktober	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</li> <li>Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan III tahun 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasarkan hasil evaluasi;</li> <li>Menyusun <b>Laporan Revisi Pencapaian Kinerja Triwulan III</b> dengan memperhatikan capaian kinerja pada Triwulan II yang belum tercapai;</li> </ul>
							November	Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;
							Desember	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</li> <li>Menyusun <b>Laporan Revisi Pencapaian Kinerja Triwulan IV</b> dengan memperhatikan capaian kinerja pada Triwulan III;</li> </ul>
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	28%	65%	75%	98%	Desember	<p><b>Januari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan pemanfaatan aplikasi JASMIN, SISDM, SMP, SIPTL dan SIAP (SIAP LK, SIAP Bamparpol);</li> <li>Memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindak lanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai;</li> <li>Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas, pemeriksaan, dan penastasaan untuk larum rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP).</li> </ul>

Strategi Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<b>Februari</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.</li> <li>Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas, pemeriksaan dan pemantauan TLRHP.</li> </ul> <b>Maret</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.</li> <li>Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas, pemeriksaan dan pemantauan TLRHP.</li> </ul> <b>April</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, dan informasi pegawai.</li> <li>Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas, pemeriksaan dan pemantauan TLRHP.</li> </ul> <b>Mei</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, dan informasi pegawai.</li> <li>Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas, pemeriksaan dan pemantauan TLRHP.</li> </ul> <b>Juni</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, dan informasi pegawai.</li> <li>Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas, pemeriksaan dan pemantauan TLRHP.</li> </ul>

Strategi Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<b>Juli</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, dan informasi pegawai.</li> <li>Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas, pemeriksaan dan pemantauan TLRHP.</li> </ul> <b>Agustus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, dan informasi pegawai.</li> <li>Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas, pemeriksaan dan pemantauan TLRHP.</li> </ul> <b>September</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, dan informasi pegawai.</li> <li>Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas, pemeriksaan dan pemantauan TLRHP.</li> </ul> <b>Oktober</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, dan informasi pegawai.</li> <li>Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas, pemeriksaan dan pemantauan TLRHP.</li> </ul> <b>November</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, dan informasi pegawai.</li> <li>Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas, pemeriksaan dan pemantauan TLRHP.</li> </ul>

Strategi Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
							<b>Desember</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperhatikan Log akses dan memberikan disposisi serta tindak lanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, dan informasi pegawai.</li> <li>Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas, pemeriksaan dan penutupan TLRHP.</li> </ul>	
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	25%	37,5%	50%	100%	<b>Desember</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi Penerapan Best Practice tahun 2023 (Penerapan Replikasi BP)</li> <li>Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Diklat LKPD persiapan pelaksanaan Pemeriksaan LKPD TA 2023)</li> </ul> <b>Februari</b> Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> di Perwakilan <b>Maret</b> Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Mentoring bagi Pegawai Magang) <b>April</b> Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Wawancara Berbasis Pengetahuan) <b>Mei</b> Inventarisir replikasi BP untuk diterapkan <b>Juni</b> Penyusunan usulan BP atau replikasi <i>Best Practice</i> . <b>Juli</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan usulan <i>Best Practice</i> atau replikasi <i>Best Practice</i>.</li> <li>Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Peer Assist).</li> </ul> <b>Agustus</b> Penyusunan usulan <i>Best Practice</i> atau replikasi <i>Best Practice</i> .	

Strategi Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
							<b>September</b> Penyusunan usulan <i>Best Practice</i> atau replikasi <i>Best Practice</i> . <b>Oktober</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Mentoring atas Pelaksanaan PKL Anak Sekolah/Magang);</li> <li>Penyusunan usulan <i>Best Practice</i> atau replikasi <i>Best Practice</i>.</li> </ul> <b>November</b> Penyusunan usulan <i>Best Practice</i> atau replikasi <i>Best Practice</i> . <b>Desember</b> Mengusulkan <i>Best Practice</i> atau replikasi <i>Best Practice</i> .	
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memastikan (3,80)	-	-	-	Memastikan (3,80)	<b>Desember</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui pemeriksaan LKPD;</li> <li>Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas;</li> <li>Membuat pernyataan independensi dan pakta integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan;</li> <li>Menyediakan <i>Whistle Blower System Perwakilan</i> berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan Online;</li> </ul> <b>Februari</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui pemeriksaan LKPD;</li> <li>Menyediakan <i>Whistle Blower System Perwakilan</i> berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan Online;</li> </ul>	

Strategi Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Keriatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p><b>Maret</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui pemeriksaan LKPD;</li> <li>Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan Online;</li> <li>Menyebarkan kuisioner IIP setelah selesai pekerjaan lapangan.</li> </ul> <p><b>April</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui pemeriksaan LKPD;</li> <li>Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan Online;</li> <li>Menyebarkan kuisioner IIP setelah selesai pekerjaan lapangan.</li> </ul> <p><b>Mei</b></p> <p>Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan Online;</p> <p><b>Juni</b></p> <p>Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan Online;</p> <p><b>Juli</b></p> <p>Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan Online;</p> <p><b>Agustus</b></p> <p>Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan Online;</p>

Strategi Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Keriatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p><b>September</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui Pemeriksaan DTT dan Kinerja;</li> <li>Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas;</li> <li>Membuat pernyataan independensi dan pakta integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan;</li> <li>Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan Online;</li> </ul> <p><b>Oktober</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui Pemeriksaan DTT dan Kinerja;</li> <li>Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan Online;</li> </ul> <p><b>November</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui Pemeriksaan DTT dan Kinerja;</li> <li>Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan Online;</li> </ul> <p><b>Desember</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui Pemeriksaan DTT dan Kinerja;</li> <li>Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan Online;</li> <li>Evaluasi hasil kuisioner IIP dan menindaklanjuti jika hasilnya tidak memuaskan.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja												Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I			TW II			TW III			TW IV				
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pembangan Kompetensi	100%	3%	10%	15%	20%	25%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	Desember	<p><b>Januari:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai.</li> <li>Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai.</li> </ul> <p><b>Februari:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p><b>Maret:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p><b>April:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p><b>Mei:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja												Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I			TW II			TW III			TW IV				
																<p><b>Juni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p><b>Juli:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p><b>Agustus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p><b>September:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p><b>Oktober:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p><b>November:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
								<p><b>Desember:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyimentarasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>Ujulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan Balai Diklat.</li> </ul>
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	84,50%	84,50%	84,50%	84,50%	84,50%	Desember	<p><b>Januari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan rapat koordinasi, evaluasi pengelolaan anggaran TA.2023;</li> <li>Menyusun Dokumen penganggaran dan Bemusatan atau pelaksanaan realisasi Anggaran;</li> </ul> <p><b>Februari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun data capaian output;</li> <li>Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang mana proses pengadaan barang dan jasa dapat dimulai sejak awal tahun anggaran;</li> </ul> <p><b>Maret</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun data capaian output;</li> <li>Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang mana proses pengadaan barang dan jasa dapat dimulai sejak awal tahun anggaran;</li> <li>Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan;</li> </ul> <p><b>April</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara teleyan dan teriadwal, untuk menghindari pencairan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun;</li> <li>Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya s.d. Rp 200 juta diselesaikan maksimal triwulan II;</li> </ul> <p><b>Mei</b></p> <p>Mempercepat proses lelang untuk belanja modal yang terkena blokir;</p> <p><b>Juni</b></p> <p>Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan;</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
								<p><b>Juli</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan;</li> <li>Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan dan rencana penarikan dana;</li> </ul> <p><b>Agustus</b></p> <p>Melakukan koordinasi internal untuk memantau penyerapan anggaran triwulan I dan II dan segera melaksanakan kegiatan yang belum terlaksana di triwulan I dan II atau melakukan revisi apabila kegiatan tersebut tidak bisa terlaksana</p> <p><b>September</b></p> <p>Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan;</p> <p><b>Oktober</b></p> <p>Segera melakukan revisi belanja pegawai apabila terdapat indikasi kekurangan;</p> <p><b>November</b></p> <p>Melakukan review dan optimalisasi kegiatan yang belum terlaksana;</p> <p><b>Desember</b></p> <p>Melakukan review dan optimalisasi kegiatan yang belum terlaksana.</p>

**SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI D. I. YOGYAKARTA  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

PERSPEKTIF, SS DAN IKU		Target	Realisasi	Skor	SKOR KINERJA
<b>SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI D. I. YOGYAKARTA</b>					<b>100,43</b>
<b>SASARAN KEGIATAN</b>					<b>100,43</b>
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	84,00%	84,00	
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100,00%	100,00	
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	95,80%	105,00	
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	100,50%	100,50	
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100,00%	100,00%	100,00	
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	100,00%	100,00	
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,81	4,81	100,00	
8	Hasil Evaluasi AKIP	90,05	91,40	101,50	
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98,00%	99,99%	102,04	
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,00%	106,90%	105,00	
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,41	105,00	
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	100,00	
13	Tingkat Kinerja Anggaran	84,50%	91,94%	105,00	